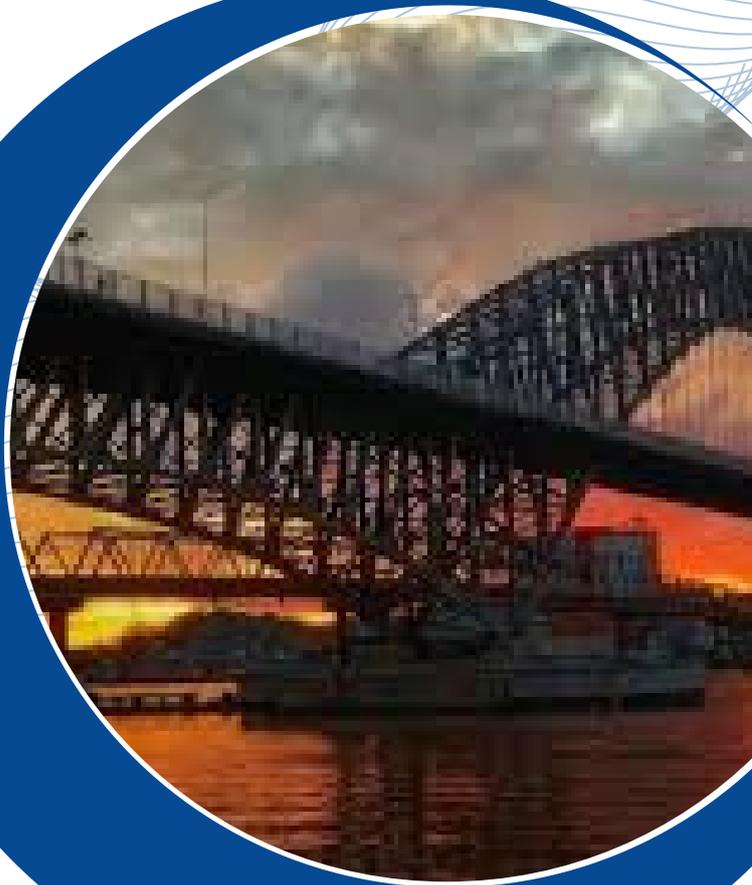




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024 dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara eksternal, Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam rangka menuju terwujudnya good governance. Secara internal, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja pada setiap unit yang ada di Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim SAKIP yang telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ditahun mendatang.

Samarinda, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Sumber Daya Aparatur.....	22
E. Aspek Strategis dan Permasalahan	25
F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	27
G. Sistematika Penyajian	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
A. Rencana Strategis	32
1. Visi dan Misi.....	32
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	33
3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Capaian Kinerja Organisasi	48
1. Analisis Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	

Dinas Kesehatan 2024	50
2. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024 dengan Tahun 2023	54
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	56
4. Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional ...	57
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan	59
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	62
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	65
B. REALISASI ANGGARAN	68
C. PRESTASI/PENGHARGAAN	70
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Tenaga ASN, PPPK dan Non ASN Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2024.....	23
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Golongan Tahun 2024	23
Tabel 1.3.	Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Samarinda Tahun 2024	24
Tabel 1.4.	Luas Wilayah Tiap Kecamatan dan Keberadaan Puskesmas di Kota Samarinda 2024.....	25
Tabel 1.5.	Hasil Nilai AKIP terhadap seluruh komponen.....	27
Tabel 1.6.	Progres Nilai AKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2023	28
Tabel 1.7.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Samarinda	28
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	34
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
Tabel 2.3.	Sasaran, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja Tahun 2024	36
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024	50
Tabel 3.2.	Tren Capaian UHC Kota Samarinda Tahun 2022 – 2024	51
Tabel 3.3.	Perkembangan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang Terakreditasi	53
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja Utama Tahun 2023 dan 2024	54

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra	56
Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	58
Tabel 3.7. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024.....	59
Tabel 3.8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024.....	68
Tabel 3.10. Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021-2024.....	69

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari laporan kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi.

B. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
 14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

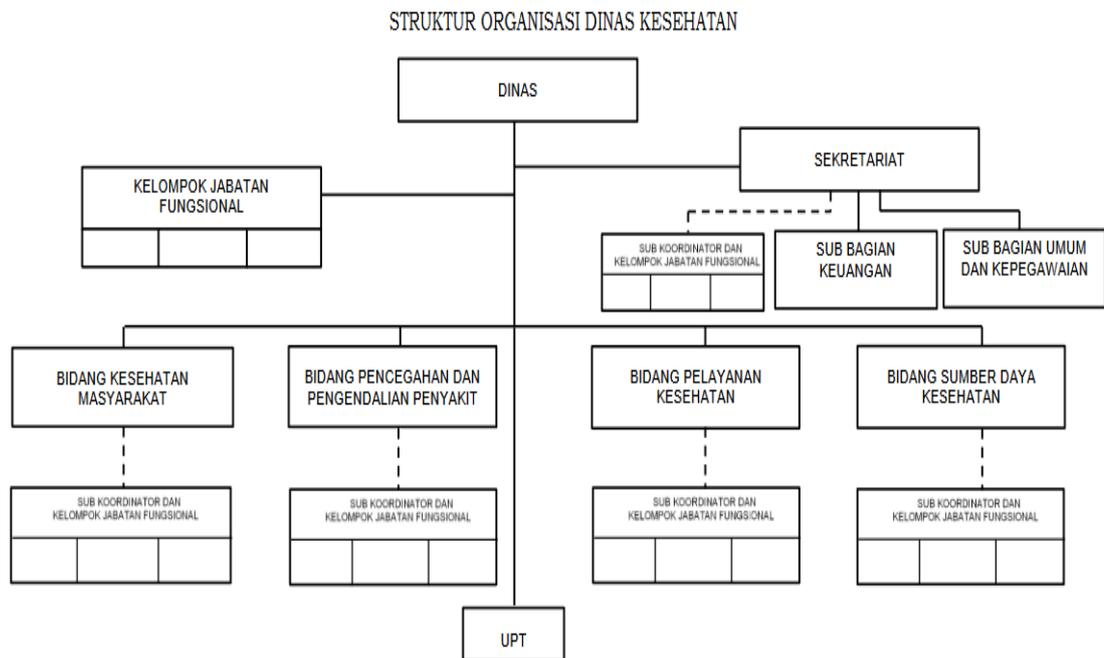
Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);

16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
17. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah

C. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Adapun gambar struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :



Beberapa ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda

1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kota

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan;
- b. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan;
- d. Penerbitan izin bidang kesehatan;
- e. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan;
- g. Pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan;
- h. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kepegawaian, urusan rumah tangga dinas, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- c. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas/retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;

- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- c. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
- d. memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. melaksanakan verifikasi SPP;
- f. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);

- h. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- j. menyusun neraca keuangan Dinas;
- k. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
- l. menyusun laporan keuangan dinas;
- m. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;

- f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- g. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai
- m. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
- n. menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi, melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan; memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- o. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;
- b) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan

- pemberdayaan masyarakat;
- e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan Kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan kebijakan, bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- d) penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- e) penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- f) penyiapan rencana kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- g) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan wabah/ klb;
- i) penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit potensial wabah;

- j) pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan Kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;

- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan Kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan Kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- e) pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- f) pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- a. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.
- b. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e) pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- f) pembuatan laporan hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam

jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;

- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dilingkungan Dinas Kesehatan Samarinda terdapat UPTD yang terdiri dari :

- a. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A;
- b. UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) meliputi:
 - 1) UPTD Puskesmas Trauma Center Kelas A;
 - 2) UPTD Puskesmas Air Putih Kelas A;
 - 3) UPTD Puskesmas Baqa Kelas A;
 - 4) UPTD Puskemas Bengkuring Kelas A;
 - 5) UPTD Puskemas Juanda Kelas A;
 - 6) UPTD Puskemas Karang Asam Kelas A;
 - 7) UPTD Puskemas Lempake Kelas A;
 - 8) UPTD Puskemas Loa Bakung Kelas A;
 - 9) UPTD Puskemas Mangkupalas Kelas A;

- 10) UPTD Puskesmas Palaran Kelas A;
- 11) UPTD Puskesmas Pasundan Kelas A;
- 12) UPTD Puskesmas Remaja Kelas A;
- 13) UPTD Puskesmas Sambutan Kelas A;
- 14) UPTD Puskesmas Segiri Kelas A;
- 15) UPTD Puskesmas Sempaja Kelas A;
- 16) UPTD Puskesmas Sidomulyo Kelas A;
- 17) UPTD Puskesmas Sungai Siring Kelas A;
- 18) UPTD Puskesmas Temindung Kelas A;
- 19) UPTD Puskesmas Wonorejo Kelas A;
- 20) UPTD Puskesmas Sungai Kapih Kelas A;
- 21) UPTD Puskesmas Harapan Baru Kelas A;
- 22) UPTD Puskesmas Makroman Kelas A;
- 23) UPTD Puskesmas Bukuan Kelas A;
- 24) UPTD Puskesmas Bantuas Kelas A;
- 25) UPTD Puskesmas Samarinda Kota Kelas A; dan
- 26) UPTD Puskesmas Lok Bahu Kelas A

c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A.

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dalam pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi pemeliharaan,

pengendalian, pengawasan dan pelayanan uji laboratorium sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen kesehatan yang diarahkan Kepala Dinas yang searah dengan kebijakan umum daerah, serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standard pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- d. pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologic, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patalogi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. pelayanan pemeriksaan dibidang Laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;

- f. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- g. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
- h. pemeliharaan peralatan laboratorium;
- i. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja) dilaboratorium dan mengelola limbah laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Sumber Daya Aparatur

Gambaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Samarinda cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seluruh Puskesmas mempunyai tenaga medis, tenaga kebidanan, sarjana kesehatan masyarakat, ahli gizi, tenaga perawat gigi, tenaga laboratorium dan asisten apoteker namun untuk tenaga apoteker masih kurang dan sangat diperlukan. Sampai saat ini jumlah tenaga ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota 973 orang, tenaga PPPK sebanyak 129 dan tenaga Non ASN sebanyak 446 orang sehingga bila ditotal mencapai 1.548 orang.

Tabel 1.1.
Jumlah Tenaga ASN, PPPK dan Non ASN
Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2024

No	Jenis Tenaga	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	ASN	228	745
2.	PPPK	34	95
3.	Non ASN	156	290
Jumlah		418	1.130

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	I	4
2	II	215
3	III	678
4	IV	76

1. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan, di dukung dengan sarana dan prasarana. Distribusi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Samarinda dapat dilihat pada daftar tabel berikut dibawah ini.

Tabel 1.3.
Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kota Samarinda Tahun 2024

No.	Pelayanan Kesehatan	Total
1	Rumah Sakit Umum	10
2	Rumah Sakit Khusus	6
3	Puskesmas Perawatan	2
4	Puskesmas Non Perawatan	24
5	Klinik	141
6	Posyandu	743

Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Samarinda Tahun 2024 yaitu Rumah Sakit Umum 10, Rumah Sakit Khusus 6, Puskesmas Perawatan ada 2, Puskesmas non perawatan 24, Klinik 141, Posyandu 743. Berikut nama-nama Rumah Sakit Umum yaitu :

- a. RSUD Abdul Wahab Sjahranie,
- b. RS Dirgahayu,
- c. RSUD Inche Abdoel Moeis,
- d. RSU Hermina Samarinda,
- e. RS Samarinda Medika Citra,
- f. RS Haji Darjad Samarinda,
- g. RS Siaga Al Munawwarah Samarinda,
- h. RSUD Aji Muhammad Salehuddin II,
- i. RS Tentara Tk. IV Samarinda,
- j. RS Bhakti Nugraha.

Berikut nama-nama Rumah Sakit Khusus di Kota Samarinda :

- a. RSJD Atma Husada Mahakam,
- b. RSIA Aisyiyah Samarinda,

- c. RS Mata Provinsi Kalimantan Timur,
- d. RSIA Qurrata A'yun Samarinda,
- e. RSIA Jimmy Medika Borneo,
- f. RS Gigi dan Mulut Unmul.

Penyebaran puskesmas disetiap kecamatan di Kota Samarinda merata. Kondisi persebaran puskesmas di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Luas Wilayah Tiap Kecamatan dan Keberadaan Puskesmas di Kota Samarinda 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Puskesmas
1	Palaran	221.29	5	3
2	Samarinda Seberang	12.49	6	2
3	Loa Janan Ilir	26.13	5	2
4	Sungai Kunjang	43.04	7	4
5	Samarinda Ulu	22.12	8	4
6	Samarinda Kota	11.12	5	1
7	Samarinda Ilir	17.18	5	1
8	Sambutan	100.95	5	3
9	Samarinda Utara	229.52	8	6
10	Sungai Pinang	34.16	5	2
JUMLAH		718.00	59	27

E. Aspek Strategis dan Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota Samarinda dengan tetap memperhatikan kondisi dan tantangan pembangunan bidang kesehatan di Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota

Samarinda 2021-2026. Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai unit kerja Pemerintah Kota Samarinda memiliki tugas pokok dan fungsi Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Beberapa isu strategi yang dihasilkan untuk mencapai visi misi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu:

a. Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata.

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dengan mengutamakan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

b. Meningkatkan kinerja dan pelayanan.

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi sehingga menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan sebagai bagian penting dari manajemen kesehatan, data dan informasi kesehatan merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan yaitu proses manajemen, pengambilan keputusan, pemerintahan dan penerapan akuntabilitas.

Permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda antara lain :

1. Kurangnya tenaga kesehatan yang didistribusikan ke Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan, masih belum merata pendistribusian tenaga kesehatan di seluruh Puskesmas, masih banyak tenaga

kesehatan yang memiliki pekerjaan rangkap sehingga pelayanan kurang maksimal.

2. Kurangnya pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan untuk keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan.
3. Kurangnya anggaran pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sehingga masih banyak tenaga kesehatan yang kesulitan ikut UKOM atau kenaikan pangkat.

F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas dari Inspektorat Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 **Sangat Baik** menunjukkan kategori **BB** dengan nilai sebesar **74,25**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5. Hasil Nilai AKIP terhadap Seluruh Komponen

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	Presentasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	25,00	83,33%
b. Pengukuran Kinerja	30%	21,25	70,83%
c. Pelaporan Kinerja	15%	10,50	70,00%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50	70,00%
Jumlah	100%	74,25	

Berikut rincian Progres Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2023 :

Tabel 1.6. Progres Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2023

No.	Tahun	Nilai	Kategori
1	2021	50,25	CC (Cukup Memadai)
2	2022	53,08	CC (Cukup Memadai)
3	2023	74,25	BB (Sangat Baik)

Tabel 1.7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi (Inspektorat)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Unit/ Satuan Kerja Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Pedoman teknis atas perencanaan kinerja	Mengajukan usulan penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja ke Bapperida	Bagian Program Perencanaan	Masih menggunakan Permendagri No. 86 Thn 2017
2	Dokumen perencanaan kinerja atas indikator kinerja (ukuran keberhasilan) agar memenuhi kriteria SMART.	Melakukan pengukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang memenuhi kriteria SMART	Bagian Program Perencanaan	Juli 2024
3	Indikator Kinerja Utama agar menggambarkan kondisi kerja utama yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan.	Melakukan peninjauan IKU agar dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis	Bidang Kesmas, P2P, SDK, Yankes, Sekretariat	Belum dilaksanakan
4	Melaksanakan seluruh rekomendasi atas perbaikan kinerja sebelumnya.	Melaksanakan rekomendasi atas perbaikan kinerja tahun 2022	Bidang Kesmas, P2P, SDK, Yankes, Sekretariat	September 2024
5	Setiap level organisasi, unit dan sub sunit agar melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjenjang	Meningkatkan perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam	Bidang Kesmas, P2P, SDK, Yankes, Sekretariat	Sudah dilaksanakan namun belum sempurna

		mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik		
6	Dokumen laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional.	Membuat laporan kinerja di level Nasional berupa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023	Bidang Kesmas, P2P, SDK, Yankes, Sekretariat	Desember 2024
7	Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Laporan kinerja dibuat sesuai perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Bidang Kesmas, P2P, SDK, Yankes, Sekretariat	Belum dilaksanakan
8	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilakukan dengan pendalaman atau keseluruhan	Melakukan evaluasi kinerja internal	Bidang Kesmas, P2P, SDK, Yankes, Sekretariat	Sudah dilaksanakan namun belum mendalam dan seluruhnya
9	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja guna peningkatan implementasi SAKIP.	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 guna peningkatan implementasi SAKIP	Bidang Kesmas, P2P, SDK, Yankes, Sekretariat	Desember 2024

G. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Aspek Strategis dan Permasalahan
- F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023
- G. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja
 - 3. Strategi dan Kebijakan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Analisis Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Kesehatan 2024

2. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2024 dengan Tahun 2023
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Langkah Perbaikan

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan yaitu “TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota Samarinda dengan tetap memperhatikan kondisi dan tantangan pembangunan bidang kesehatan di Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026. Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang kesehatan berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan sumber daya kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan selalu memprioritaskan peningkatan mutu layanan di sarana pelayanan kesehatan khususnya milik pemerintah.

Berdasarkan hasil revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan melihat keterkaitan serta implementasi dengan visi misi yang ada, maka Dinas Kesehatan Kota Samarinda menetapkan tujuan “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Samarinda”

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, yakni :
“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”
maka Dinas Kesehatan bertekad untuk turut serta dalam uapaya menunjang dan mensukseskan pembangunan dan pengembangan Kota Samarinda. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah Menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan merupakan Langkah awal untuk melaksanakan penjabaran dari Misi ke 1 (satu) Kota Samarinda yaitu, “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN BERBUDAYA”.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang dimaksud pada Perjanjian Kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Sasaran yang ada pada Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda kemudian diidentifikasi sebagai sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2021 – 2026 beserta Indikator Kinerja, Target Capaian dan Program/Kegiatan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Kesehatan

Kota Samarinda ada 2 (dua) yaitu :

1. Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Didukung oleh indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage;
- b. Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi.

Dalam mewujudkan Misi ke 1 (satu) Kota Samarinda maka Dinas Kesehatan mempunyai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal /health coverage
	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Samarinda, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan. Berikut adalah Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Samarinda :

Tabel 2.2.
Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal /health coverage	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan - Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang
	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atau lembaga pemerintahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. Tujuan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, transparansi, dan integritas
2. Sebagai dasar evaluasi kinerja
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
5. Sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan supervisi kinerja
6. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja biasanya dibuat setiap tahun. Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

**Tabel 2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage	100
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	84

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1.1.2	Pembangunan Puskesmas
1.1.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.1.4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1.1.5	Pengembangan Puskesmas
1.1.6	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1.1.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1.1.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.1.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.1.11	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.1.12	Pengembangan Rumah Sakit
1.1.13	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
1.1.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
1.1.15	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

1.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1.2.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1.2.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1.2.23	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1.2.24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.2.25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.2.26	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
1.2.27	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
1.2.28	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
1.2.29	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.2.30	Operasional Pelayanan Puskesmas
1.2.31	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Karang Asam)
1.2.32	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Loa Bakung)
1.2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bantuas)
1.2.34	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kampung Baqa)
1.2.35	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Makroman)
1.2.36	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Palaran)
1.2.37	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Air Putih)
1.2.38	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Juanda)

1.2.39	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Samarinda Kota)
1.2.40	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bengkuring)
1.2.41	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Mangkupalas)
1.2.42	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Kapih)
1.2.43	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Remaja)
1.2.44	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Segiri)
1.2.45	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sambutan)
1.2.46	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Siring)
1.2.47	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sidomulyo)
1.2.48	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sempaja)
1.2.49	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Temindung)
1.2.50	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trauma Center)
1.2.51	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lempake)
1.2.52	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lok Bahu)
1.2.53	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bukuan)

1.2.54	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Harapan Baru)
1.2.55	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Pasundan)
1.2.56	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Wonorejo)
1.2.57	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.2.58	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.2.59	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1.2.60	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
1.2.61	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1.2.62	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
1.2.63	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
1.2.64	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
1.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
1.4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
2.1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
2.2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
2.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3.3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
3.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
3.4	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
3.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
3.5	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
3.5.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
4.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
4.2.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
5.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.3.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.3.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.7	Peningkatan Pelayanan BLUD
5.7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Labkesda)
5.7.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Temindung)
5.7.3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bantuas)
5.7.4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Trauma Center)
5.7.5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Kampung Baqa)
5.7.6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD IA. MOEIS)
5.7.7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Segiri)
5.7.8	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Palaran)
5.7.9	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sungai Siring)
5.7.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Air Putih)
5.7.11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Samarinda Kota)
5.7.12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Wonorejo)
5.7.13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Lempake)

5.7.14 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT
Puskesmas Sidomulyo)

5.7.15 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT
Puskesmas Lok Bahu)

5.7.16 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT
Puskesmas Bukuan)

5.7.17 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT
Puskesmas Makroman)

5.7.18 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT
Puskesmas Juanda)

5.7.19 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT
Puskesmas Harapan Baru)

5.7.20 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT
Puskesmas Karang Asam)

5.7.21 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT
Puskesmas Bengkuring)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : sasaran, indikator kinerja, target Program dan Kegiatan serta Anggaran, sedangkan satuan pengukuran kinerja masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk persentase, orang, rupiah, buah, hari, unit dan sebagainya.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan rencana kinerja di awal tahun ditetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
81 – 100	Tercapai / Berhasil
61 – 80	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
41 – 60	Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
< 40	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor : PER/09/M.Pan/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan

instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda disampaikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2024 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang kemudian dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2024 sebagai berikut :

1. Analisis Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan 2024

**Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage	100	100,37	100,37%
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	84	96,36	114,71%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2024 yaitu tergolong dalam kriteria “Tercapai/Berhasil”. Pada sasaran pertama terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan dengan indikator persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage ditargetkan 100 dan terealisasi 100,37 atau capaian realisasi 100,37%.

Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda, yakni terjaminnya akses masyarakat

pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistic dan berkelanjutan. Layanan kesehatan merupakan layanan dasar yang berhak diperoleh seluruh masyarakat sesuai siklus hidup. Persentase capaian UHC di Kota Samarinda terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Persentase capaian UHC selama 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.

Tren Capaian UHC Kota Samarinda Tahun 2022 - 2024

Tahun	Jumlah Kepesertaan JKN (orang)	Jumlah Penduduk (orang)	Persentase Capaian (%)
2022	816.008	849.717	96,03 %
2023	860.979	861.878	99,89 %
2024	871.733	868.499	100,37 %

Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Kota Samarinda

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian UHC Kota Samarinda mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Kenaikan tren tersebut didukung beberapa faktor, yakni :

1. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan cara kerja program jaminan kesehatan, sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat terlibat dalam program JKN;

2. Komitmen Pemerintah

Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan UHC, termasuk penyusunan regulasi, penyediaan anggaran untuk masyarakat kurang mampu, turut andil dalam peningkatan capaian UHC di kota Samarinda;

3. Infrastruktur Kesehatan yang memadai

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas mendukung akses layanan kesehatan yang baik. Infrastruktur yang kuat membantu dalam menyediakan layanan kesehatan secara efektif.

Sasaran kedua yaitu Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi capaian yang ditargetkan pada sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebesar 84 dan terealisasi 96,36 sehingga capaian realisasinya 114,71%. Akreditasi fasilitas kesehatan adalah proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan terhadap kualitas layanan dan operasional suatu fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) oleh Lembaga akreditasi yang berwenang. Tujuan utama dari akreditasi ini adalah untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar tertentu dalam hal pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan manajemen operasional. Tujuan Akreditasi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

Akreditasi mendorong fasilitas kesehatan untuk meningkatkan standar pelayanan agar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

2. Keselamatan Pasien

Proses ini menekankan pentingnya keselamatan pasien dengan mengharuskan penerapan praktik-praktik yang mengurangi risiko dan meningkatkan hasil kesehatan.

3. Kepercayaan Publik

Fasilitas yang terakreditasi biasanya lebih dipercaya oleh masyarakat karena telah melalui proses evaluasi yang ketat.

4. Perlindungan Tenaga Kesehatan

Akreditasi juga berfungsi untuk melindungi tenaga kesehatan dengan memastikan bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang aman dan berkualitas.

5. Tata Kelola Organisasi

Meningkatkan tata Kelola organisasi dan pelayanan di Fasyankes dan mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Samarinda yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit secara bertahap sudah dilakukan sejak tahun 2015, sedangkan akreditasi Klinik dan Laboratorium Kesehatan baru dilakukan pada tahun 2023. Perkembangan akreditasi fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.
Perkembangan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang Terakreditasi

FASKES	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	JUMLAH	JUMLAH TERAKREDITASI	PERSEN TASE	JUMLAH	JUMLAH TERAKREDITASI	PERSEN TASE
PUSKESMAS	26	26	100,00	26	26	100,00
RUMAH SAKIT	15	15	100,00	16	15	93,75
LABORATORIUM	2	2	100,00	2	2	100,00
KLINIK	10	0	0	11	10	90,91
TOTAL	53	43	81,13	55	53	96,36

Sumber : Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Samarinda

2. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.4.
Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
	2023	2024	2023	2024
Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage	99,89	100,37	99,89	100,37
Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	81,13	96,36	114,27	114,71

Dari tabel diatas maka dapat dianalisis realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun ini dengan tahun lalu yaitu sebagai berikut :

1. Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage.

Berdasarkan pada tabel diatas, diketahui pada tahun 2023 sampai dengan 2024 realisasi kinerja pada indikator persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage mengalami peningkatan sebesar 0,48. Diketahui capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,89% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 100,37%.

Universal Health Coverage (UHC) adalah konsep yang memastikan setiap individu memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative yang bermutu tanpa menghadapi kesulitan finansial. UHC bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin. Elemen utama UHC meliputi :

- Akses Layanan Kesehatan
Semua orang dapat mengakses layanan kesehatan esensial dengan kualitas yang memadai.
 - Perlindungan Finansial
Dengan adanya jaminan kesehatan diharapkan masyarakat tidak mengalami kesulitan ekonomi akibat biaya yang dikeluarkan untuk layanan kesehatan.
 - Kesetaraan dan Keadilan
Menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam akses layanan kesehatan berdasarkan faktor sosial, ekonomi, atau geografis.
2. Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi.
Berdasarkan tabel diatas diketahui pada tahun 2023 sampai dengan 2024 realisasi kinerja pada indikator persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi 114,71%. Diketahui capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 114,27% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 114,44%.
Capaian akreditasi fasilitas kesehatan milik pemerintah di kota Samarinda dari tahun 2023 ke 2024 meningkat. Capaian akreditasi yang baik dapat terwujud dengan adanya dukungan dari manajemen, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta penerapan sistem manajemen kualitas yang baik. Dengan faktor-faktor pendukung ini, fasilitas kesehatan dapat mencapai standar akreditasi yang diinginkan dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya, memberikan dampak positif bagi pasien, dan memastikan keselamatan serta kualitas layanan yang tinggi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah RENSTRA 2021-2026
1	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage	persen	100,37	100
2	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	persen	96,36	84

Dari tabel tersebut, maka dapat dianalisis kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra, yaitu sebagai berikut :

a. Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage pada tahun 2024 terealisasi 100,37% dari target jangka menengah sebesar 100. Universal Health Coverage (UHC) adalah konsep yang memastikan setiap individu memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative yang bermutu tanpa menghadapi kesulitan finansial. UHC bertujuan untuk memberikan

perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

- b. Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi.
Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 terealisasi 96,36% dari target jangka menengah sebesar 84%. Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang ke-2 yakni Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan indikator kinerja Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang Terakreditasi. Akreditasi fasilitas kesehatan adalah proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan terhadap kualitas layanan dan operasional suatu fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) oleh Lembaga akreditasi yang berwenang.

4. Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia adalah sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau. UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Pemerintah Indonesia terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang satu dasawarsa terakhir dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sudah sejalan dengan upaya-upaya yang dicanangkan dalam Program Kerja WHO. Target Universal Health Coverage (UHC) Nasional adalah 98% pada tahun 2024. Target ini merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 3.6.
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Capaian Kota Samarinda
1	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage	98 %	100,37 %
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	100 %	96,36 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian UHC kota Samarinda lebih tinggi daripada capaian UHC Nasional. Dengan capaian yang baik ini, tentu saja merupakan salah satu faktor pemicu bagi kota Samarinda untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang baik didukung dengan adanya tenaga kesehatan yang terpenuhi secara kuantitas dan kualitas (terlatih), selain itu didukung oleh sarana prasarana yang memadai, dan regulasi pendukung dari pemerintah daerah. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat kota Samarinda.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan

Tabel 3.7.

Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interval Realisasi Kinerja (%)			
					81-100	61-80	41-60	<40
1	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage	100	100,37	100,37	√			
2	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	84	96,36	114,71	√			

Adapun yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage

Universal Health Coverage (UHC) adalah konsep yang memastikan setiap individu memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative yang bermutu tanpa menghadapi kesulitan finansial. UHC bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

Elemen utama UHC meliputi :

- Akses Layanan Kesehatan
Semua orang dapat mengakses layanan kesehatan esensial dengan kualitas yang memadai.
- Perlindungan Finansial
Dengan adanya jaminan kesehatan diharapkan masyarakat tidak mengalami kesulitan ekonomi akibat biaya yang dikeluarkan untuk layanan kesehatan.
- Kesetaraan dan Keadilan
Menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam akses layanan kesehatan berdasarkan faktor sosial, ekonomi, atau geografis.

Faktor keberhasilan atas capaian indikator kinerja pada UHC yaitu :

- Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan cara kerja program jaminan kesehatan, sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat terlibat dalam program JKN;
- Komitmen Pemerintah
Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan UHC, termasuk penyusunan regulasi, penyediaan anggaran untuk masyarakat kurang mampu, turut andil dalam peningkatan capaian UHC di kota Samarinda;
- Infrastruktur Kesehatan yang memadai
Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas mendukung akses layanan kesehatan yang baik. Infrastruktur yang kuat membantu dalam menyediakan layanan kesehatan secara efektif.

Beberapa faktor penyebab kegagalan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tantangan dalam Manajemen Program

Manajemen program UHC melibatkan beberapa lembaga dan instansi. Perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat juga memberikan tantangan tersendiri terhadap implementasi UHC;

2. Biaya pengobatan yang tinggi

Biaya obat-obatan, alat kesehatan, dan biaya perawatan kesehatan yang tinggi masih menjadi masalah bagi implementasi UHC, merupakan tantangan bagi pemerintah agar beban jaminan kesehatan ini tidak menjadi hutang di tahun-tahun kedepan.

b. Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi.

Capaian akreditasi yang baik dapat terwujud dengan adanya dukungan dari manajemen, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta penerapan sistem manajemen kualitas yang baik. Dengan faktor-faktor pendukung ini, fasilitas kesehatan dapat mencapai standar akreditasi yang diinginkan dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya, memberikan dampak positif bagi pasien, dan memastikan keselamatan serta kualitas layanan yang tinggi.

Kendala dalam pencapaian akreditasi faskes milik pemerintah di Kota Samarinda, yakni sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya: Fasilitas kesehatan pemerintah seringkali menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi semua standar akreditasi.
2. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Meskipun tenaga medis di fasilitas kesehatan pemerintah sering kali memiliki kualifikasi

yang baik, pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan mereka dapat terbatas.

3. Proses Administratif: Beberapa fasilitas mungkin menghadapi tantangan dalam manajemen administrasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan akreditasi.
4. Komitmen Manajemen: Keberhasilan akreditasi juga tergantung pada dukungan dari manajemen fasilitas kesehatan untuk menerapkan perubahan yang diperlukan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2024 sebesar Rp 524.069.555.201,- dibandingkan tahun lalu alokasi anggaran mengalami kenaikan. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Anggaran dalam pencapaian sasaran pertama terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan yaitu sebesar Rp 227.738.397.011,- dan anggaran dalam pencapaian sasaran kedua Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yaitu sebesar Rp 296.331.158.190,- dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage	100	100.37	100.37	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	220,435,677,185	208,082,478,109	94,40
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,790,000,000	4,758,767,279	99,35
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1,058,131,000	878,909,630	83,06

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Urusan / Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,454,588,826	1,400,363,217	96,27
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	84	96.36	114.71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	296,331,158,190	261,214,882,385	88,15
JUMLAH							524.069.555.201	476.335.400.620	90,89

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage.

Berikut adalah beberapa faktor yang menunjang keberhasilan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terhadap cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage (UHC) :

- Kebijakan dan dukungan kuat dari berbagai instansi, termasuk BPJS Kesehatan, kementerian, dan pemerintah daerah, menciptakan kerangka kerja yang efektif untuk mencapai target UHC.
- Penggunaan teknologi seperti aplikasi Mobile JKN dan sistem pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
- Partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan sangat penting. Pemberdayaan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit akan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam program UKP dan UKM.

Berikut adalah beberapa faktor penghambat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terhadap cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage (UHC) :

- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit menjadi faktor penghambat. Kurangnya pengetahuan tentang program kesehatan juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat.
 - Infrastruktur kesehatan yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur kesehatan menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
 - Tantangan dalam manajemen program yang kurang efektif, termasuk dalam hal monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan, juga menjadi faktor penghambat
- b. Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi
- Berikut adalah beberapa faktor yang menunjang keberhasilan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
- Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari manajemen sangat penting dalam mengarahkan tim dan memastikan bahwa tujuan akreditasi tercapai
 - Pelatihan berkelanjutan bagi staf tentang standar akreditasi sangat penting. Staf yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih siap untuk memenuhi standar yang ditetapkan
 - Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan material yang memadai sangat mendukung proses akreditasi.

Berikut adalah beberapa faktor penghambat fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- Persiapan yang tidak matang dan perencanaan yang kurang efektif serta monitoring dan evaluasi yang kurang efektif dapat menghambat proses akreditasi
- Dokumen yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam mendapatkan akreditasi.
- Kurangnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi staf dapat menghambat pemahaman dan penerapan standar akreditasi

B. Realisasi Anggaran

Gambaran distribusi alokasi anggaran untuk setiap indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2024 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024

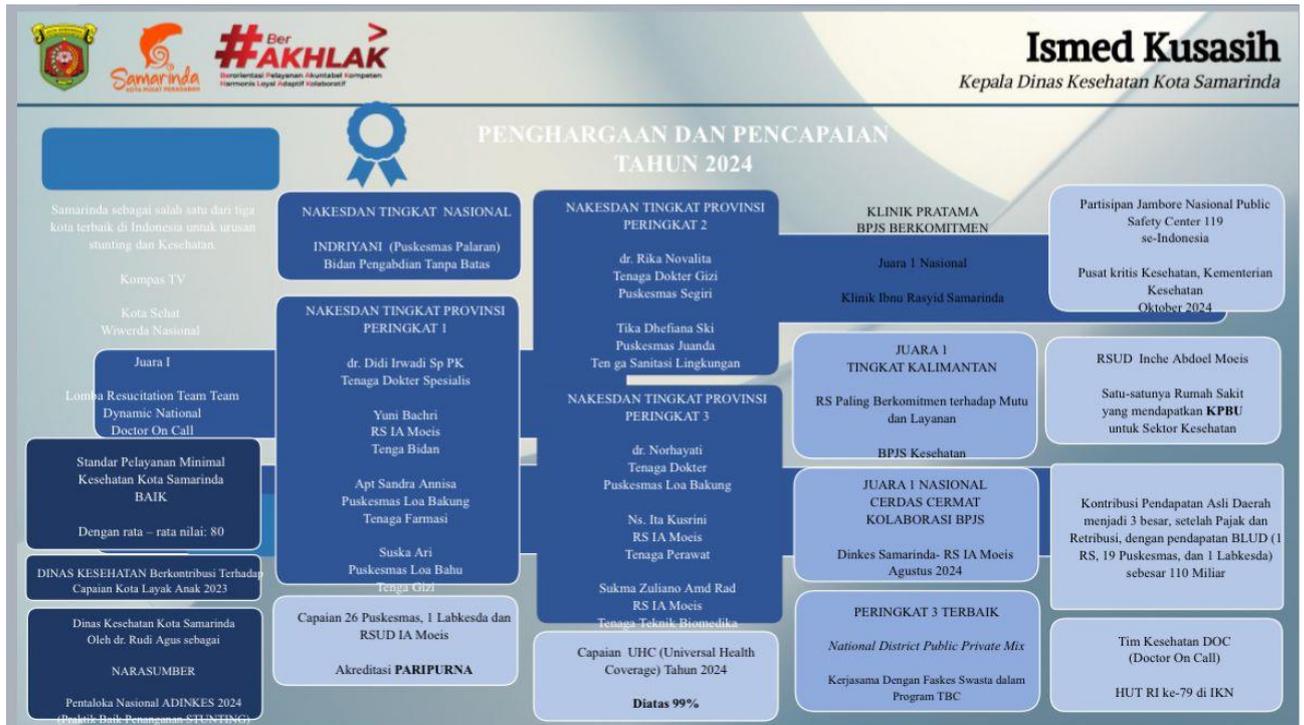
No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	220.435.677.185	208.082.478.109	94,40
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.790.000.000	4.758.767.279	99,35
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.058.131.000	878.909.630	83,06
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.454.588.826	1.400.363.217	96,27
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	296.331.158.190	261.214.882.385	88,15
JUMLAH				524.069.555.201	476.335.400.620	90,89

Anggaran untuk pelaksanaan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10.
Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kota Samarinda Tahun 2021-2024

No	Jenis Sumber Pembiayaan	Jumlah Alokasi			
		2021	2022	2023	2024
1	APBD Kota	316.538.901.840	365.844.399.798	416.112.240.997	487.344.878.201
2	APBD Provinsi	-	-	-	-
3	APBN (DAK Fisik/Non Fisik)	42.053.119.290	22.909.753.750	34.857.654.658	36.724.677.000
Total		358.592.021.130	388.754.153.548	450.969.895.655	524.069.555.201

C. Prestasi / Penghargaan



Beberapa prestasi dan penghargaan lain Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2024 dapat dilihat pada link berikut :

https://www.youtube.com/watch?v=Le_9Eh7ojuUg

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Samarinda berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Pada sasaran pertama terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan dengan indikator persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/ universal/ health coverage ditargetkan 100% dan terealisasi 100,37% atau capaian realisasi 100,37%. Pada indikator persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage mengalami peningkatan sebesar 0,48. Pada tahun 2023 yaitu sebesar 99,89% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 100,37%.

Sasaran kedua yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi capaian yang ditargetkan pada sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebesar 84% dan terealisasi 96,36% sehingga capaian realisasinya 114,71%. Pada tahun 2023 diketahui capaian kinerja yaitu sebesar 114,27% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,44.

Beberapa faktor keberhasilan tersebut diatas antara lain:

1. Dukungan anggaran untuk kesehatan diwilayah Kota Samarinda.
2. Kolaborasi Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan diwilayah kerja Dinas Kesehatan yang menunjang keberhasilan kesehatan.
3. Dukungan dari pemerintah, masyarakat dan penguatan program kesehatan masyarakat.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program

di Dinas Kesehatan Kota Samarinda berjalan bersinergi.

5. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa seksi berjalan optimal dan tentunya berpengaruh pada tingkat keberhasilan capaian indikator kinerja.

Beberapa faktor penghambat dalam proses pencapaian tersebut antara lain :

1. Peran serta semua elemen pemangku program dan kegiatan yang ada belum optimal, termasuk puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan Masih kurangnya tenaga medis di puskesmas dan masih kurang keterampilan/meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan sesuai tugasnya.
2. Masih banyak tumpang tindis tugas pada tenaga kesehatan di Puskesmas sehingga konsentrasi tugas terbagi.
3. Masih banyak tenaga kesehatan yang perlu di bimtek/pelatihan sesuai tugas terkendala anggaran untuk pelatihan bimbingan teknis kurang memadai.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan.

Solusi yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya antara lain adalah :

1. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
2. Mengadakan pelatihan/Bimtek kepada tenaga kesehatan agar lebih terampil sesuai tugasnya.
3. Menambah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan promosi kesehatan betapa pentingnya hidup sehat dengan baliho, reklame, panflet, dan lain-lain yang dapat mudah diakses masyarakat.
5. Sinergitas dalam memahami dan pelaksanaan program dan kegiatan baik di Dinas Kesehatan maupun di tingkat UPT Dinas Kesehatan lebih

ditumbuhkan.

6. Kemampuan dalam penyusunan program dan kegiatan diupayakan lebih aplikatif, tepat guna dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dinas

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja tahun 2024 dibuat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 27 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yang berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	Persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/ health coverage	100
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	84

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP 196809111998031009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI HARUN**
Jabatan : Wali Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wali Kota Samarinda



Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terjaminnya akses masyarakat pembangunan kesehatan yg berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	persentase cakupan jaminan kesehatan semesta/universal/health coverage	100%
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	84%

Program	Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 235.697.836.011
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 5.413.645.000
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 917.716.000
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.141.200.000
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 285.340.911.229

Wali Kota Samarinda



Andi Harun

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Samarinda



dr. Irmid Kusasih

NIP. 196809111998031009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: info@samarindakota.go.id

LEMBAR ASISTENSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Tanggal Asistensi : 26 Maret 2024

Kriteria	Catatan
Kesesuaian Format Penyusunan	Oke
Keselaran dengan Dokumen Perencanaan	Oke
Indikator Berorientasi <i>Outcome</i>	Oke

Diasistensi Oleh,


AGATHA SABRINA AKA

Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan

Fransiska Martini

Mengetahui,
Ketua Tim


Muhammad Rizky Nugraha, S.Kom
NIP. 199304272015031001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Osa Rafshodia Rafidin**

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Ismid Kusasih**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

dr. Osa Rafshodia Rafidin
NIP. 197905312008011012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,57 rasio
		Rasio daya tamping Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	1,47 rasio

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.015.220.000
b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	781.533.010
c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.326.077.858
d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	650.000.000
e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	778.000.000
f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000
g. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.164.425.000
h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100.000.000
i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	119.500.000
j. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100.000.000
k. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.844.776.880
l. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	198.500.000
m. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000.000
n. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000
o. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	500.000.000
p. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	500.000.000
q. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000.000

r.	Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas	170.000.000
s.	Operasional Pelayanan Puskesmas Palaran	100.000.000
t.	Operasional Pelayanan Puskesmas Pasundan	170.000.000
u.	Operasional Pelayanan Puskesmas Remaja	170.000.000
v.	Operasional Pelayanan Puskesmas Sambutan	170.000.000
w.	Operasional Pelayanan Puskesmas Segiri	100.000.000



Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit



dr. Osa Rafshodia Rafidin
NIP. 197905312008011012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Dian Margi Utami Gunadi**

Jabatan : Dokter Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Osa Rafshodia Rafidin**

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

dr. Osa Rafshodia Rafidin
NIP. 197905312008011012

Samarinda, 02 Januari 2024

Dokter Muda

dr. Dian Margi Utami Gunadi
NIP. 198511262014032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919.827 jiwa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	778.000.000
b. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.844.776.880
c. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	500.000.000
d. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	500.000.000
e. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000.000



Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dr. Osa Rafshodia Rafidin
NIP. 197905312008011012

Samarinda, 02 Januari 2024
Dokter Muda

dr. Dian Margi Utami Gunadi
NIP. 198511262014032004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Nata Siswanto**

Jabatan : Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (Penyetaraan)

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Osa Rafshodia Rafidin**

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2024
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda



Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

dr. Osa Rafshodia Rafidin
NIP. 197905312008011012

dr. Nata Siswanto
NIP. 197102012003121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919.827 jiwa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000
b. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.164.425.000
c. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100.000.000
d. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	198.500.000
e. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000.000
f. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000



Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dr. Osa Rafshodia Rafidin
NIP. 197905312008011012

Samarinda, 02 Januari 2024
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda

dr. Nata Siswanto
NIP. 197102012003121004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Hj. Fitriany Madjid**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan



dr. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan



dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Persentase terpenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar.	100%
2	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	40%
3	Tersedianya Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
-	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
a.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.052.485.000
b.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	160.000.000
c.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.864.535.500
d.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	160.000.000
-	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a.	Operasional Pelayanan Puskesmas Makroman	100.000.000
b.	Operasional Pelayanan Puskesmas Bantuas	100.000.000
c.	Operasional Pelayanan Puskesmas Lok Bahu	100.000.000
d.	Operasional Pelayanan Puskesmas Samarinda Kota	100.000.000
e.	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Asam	100.000.000

f. Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan	100.000.000
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
- Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
a. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	600.000.000
b. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	550.000.000
- Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
a. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	220.000.000
b. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	220.000.000
c. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.474.550.000
- Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.349.095.000
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
- Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	286.148.000

Kepala Dinas Kesehatan



dr. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan



dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Dwi Nilasari**

Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Hj. Fitriany Madjid**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

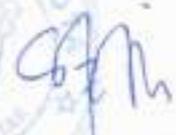
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Administrator Kesehatan Ahli Muda


dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001


dr. Dwi Nilasari
NIP. 198507292014032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya fasilitas dan upaya kesehatan perorangan kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	28 faskes
2	Tersedianya Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	28 faskes

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
-	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
a.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.052.485.000
b.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	160.000.000

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001

Samarinda, 02 Januari 2024

Administrator Kesehatan Ahli Muda

dr. Dwi Nilasari
NIP. 198507292014032003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akhmad Fauzi, S.Far, Apt**

Jabatan : Apoteker Ahli Muda (Penyetaraan)

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Hj. Fitriany Madjid**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001

Samarinda, 02 Januari 2024

Apoteker Ahli Muda

Akhmad Fauzi, S.Far, Apt
NIP. 198705122014031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya fasilitas dan upaya kesehatan perorangan kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	28 faskes
2	Terbitnya sertifikat Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	50 sertifikat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
-	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
a.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.864.535.500
2.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
-	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
a.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	286.148.000

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001

Samarinda, 02 Januari 2024
Apoteker Ahli Muda

Akhmad Fauzi, S.Far, Apt
NIP. 198705122014031003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Iam Minerva, SKM, M.Kes**

Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Madya (Penyetaraan)

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Hj. Fitriany Madjid**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

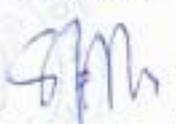
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Administrator Kesehatan Ahli Madya


dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001


Iam Minerva, SKM, M.Kes
NIP. 196802221988022002

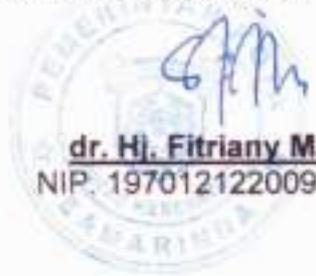
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	2.000 orang
2	Pembinaan dan Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan Di wilayah Kesehatan Kota Samarinda	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan Di wilayah Kesehatan Kota Samarinda	100 Praktek Tenaga Kesehatan
3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	250 orang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
-	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
a.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	600.000.000
b.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	550.000.000
-	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
a.	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	220.000.000
b.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	220.000.000
c.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.474.550.000

- **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.349.095.000

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan



dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001

Samarinda, 02 Januari 2024
Administrator Kesehatan Ahli Madya

Iam Minerva, SKM, M.Kes
NIP. 196802221988022002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121
<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Melliyani Agustini, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Ismid Kusasih**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan


dr. Melliyani Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,57
		Rasio daya tamping Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	1,47

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5.000.000.000
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100.000.000
b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	150.000.000
c. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	53.710.776.000
d. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400.000.000
e. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	300.000.000
f. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6.200.000.000
g. Operasional Pelayanan Puskesmas Air Putih	100.000.000
h. Operasional Pelayanan Puskesmas Bengkuring	100.000.000
i. Operasional Pelayanan Puskesmas Harapan Baru	100.000.000
j. Operasional Pelayanan Puskesmas Juanda	100.000.000
k. Operasional Pelayanan Puskesmas Kampung Baqa	100.000.000
l. Operasional Pelayanan Puskesmas Lempake	100.000.000
m. Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Bakung	170.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
- Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	260.000.000
b. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000
c. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	82.740.000



Kepala Dinas Kesehatan

dr. Ismid Kusasih

NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

dr. Melliayani Agustini, M.Kes

NIP. 197704272006042008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Kusuma Wijayanti,MSI**

Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Melliyani Agustini, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2024

Administrator Kesehatan Ahli Muda

dr. Kusuma Wijayanti, M.SI

NIP. 197409012003122011



Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

dr. Melliyani Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya fasilitas dan upaya kesehatan perorangan kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	32 faskes
2	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919.827 jiwa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5.000.000.000
d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
d. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	300.000.000



Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

dr. Melliyani Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008

Samarinda, 02 Januari 2024
Administrator Kesehatan Ahli Muda

dr. Kusuma Wijayanti,MSI
NIP. 197409012003122011



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Vetresia Bumbungan, SKM**

Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Melliyani Agustini, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2024

Administrator Kesehatan Ahli Muda



Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

dr. Melliyani Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008

Vetresia Bumbungan, SKM
NIP. 196905212000032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya fasilitas dan upaya kesehatan perorangan kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	32 faskes
2	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919.827 jiwa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100.000.000
b. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	53.710.776.000
c. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6.200.000.000
- Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	260.000.000
b. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000
c. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	82.740.000

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan



Mellyani Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008

Samarinda, 02 Januari 2024
Administrator Kesehatan Ahli Muda

Vetresia Bumbungan, SKM
NIP. 196905212000032002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anastasia Kelawing**

Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda (Penyetaraan)

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. Melliyani Agustini, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

dr. Melliyani Agustini, M.Kes

NIP. 198704272006042008

Samarinda, 02 Januari 2024
Administrator Kesehatan Ahli Muda

Anastasia Kelawing
NIP. 196612101989112001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, acupressure, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, acupressure, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	4 Dokumen
2	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919.827 jiwa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	150.000.000



Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

dr. Meliyani Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008

Samarinda, 02 Januari 2024
Administrator Kesehatan Ahli Muda

Anastasia Kelawing
NIP. 196612101989112001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH

Jalan P Suryanata RT 33 No 41, Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu,

Kota Samarinda Kalimantan Timur 75124

<https://pkm-air-putih.samarindakota.go.id> Email: pkmairputih@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg.Zheditya Ayu Syawalia

Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Air Putih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**

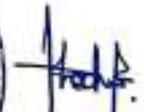
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196509111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Air Putih

drg. Zheditya Ayu Syawalia
NIP. 198805262014032004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH

Jalan P Suryanata RT 33 No 41, Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu,

Kota Samarinda Kalimantan Timur 75124

<https://pkm-air-putih.samarindakota.go.id> Email: pkmairputih@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA UPTD. PUSKESMAS AIR PUTIH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	42.181

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD. Puskesmas Air Putih)	Rp 1.500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD. Puskesmas Air Putih)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 1.600.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
Agus Kusasih
NIP. 1998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Air Putih

dr. Zheditya Ayu Syawalia
NIP. 198805262014032004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH

Jalan P Suryanata RT 33 No 41, Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu,

Kota Samarinda Kalimantan Timur 75124

<https://pkm-air-putih.samarindakota.go.id> Email: pkmairputih@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Rahmawaty,SKM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Air Putih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg.Zheditya Ayu Syawalia

Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Air Putih

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kepala UPTD Puskesmas Air Putih

drg.Zheditya Ayu Syawalia
NIP. 198805262014032004

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Air Putih

Dyah Rahmawaty,SKM
NIP. 19810292006042013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH

Jalan P Suryanata RT 33 No 41, Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda Kalimantan Timur 75124

<https://pkm-air-putih.samarindakota.go.id> Email: pkmairputih@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD. PUSKESMAS AIR PUTIH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD. Puskesmas Air Putih)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000



Kepala UPTD Puskesmas Air Putih

Drg. Zheditya Ayu Syawalia
NIP. 198805262014032004

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Air Putih

Dyah Rahmawaty SKM
NIP. 198110292006042013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg.Satria Herlangga
Jabatan : Kepala UPTD, Puskesmas Bantuas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 198809411998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD, Puskesmas Bantuas

drg. Satria Herlangga
NIP. 19830831 201403 1 002

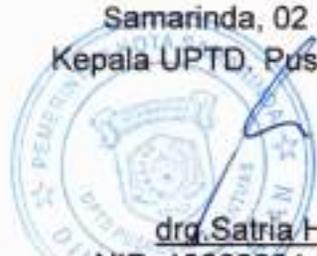
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS BANTUAS**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	4.763

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Bantuas)	Rp 500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bantuas)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 600.000.000

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Bantuas

drg. Satria Herlangga
NIP. 19830831 201403 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supangat, A.Md.Kep
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Bantuas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg.Satria Herlangga
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Bantuas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Bantuas



drg. Satria Herlangga
NIP. 19830831 201403 1 002

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Bantuas



Supangat, A.Md.Kep
NIP. 19700606 199102 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS BANTUAS**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bantuas)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000



Kepala UPTD. Puskesmas Bantuas

drg. Satria Herlangga

NIP. 19830831 201403 1 002

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Bantuas

Supangat, A.Md.Kep

NIP. 19700606 199102 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Opiansyah
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Baqa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Kepala UPTD. Puskesmas Baqa

dr. Opiansyah
NIP. 19761201 200604 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS BAQA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	36.068

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Baqa)	Rp 2.100.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Baqa)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 2.200.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Baqa

dr. Opiansyah
NIP. 19761201 200604 1 012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tisna, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Baqa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Opiansyah
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Baqa

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala UPTD, Puskesmas Baqa



dr. Opiansyah

NIP. 19761201 200604 1 012

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Baqa

Tisna, SE

NIP. 19720817 200701 1 033

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS BAQA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Baqa)	Rp 100,000,000
JUMLAH	Rp 100,000,000

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala UPTD. Puskesmas Baqa



dr. Opiansyah
NIP. 19761201 200604 1 012

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Baqa

Tisna, SE
NIP. 19720817 200701 1 033



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Rosnaniar
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Bukuan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

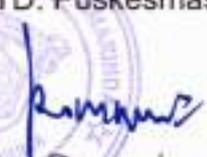
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Bukuan



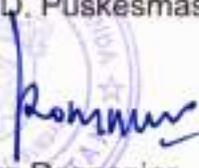
drg. Rosnaniar
NIP. 197112282002122007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS BUKUAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	17.134

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Bukuan)	Rp	500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bukuan)	Rp	100.000.000
JUMLAH	Rp	600.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196409111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 197112282002122007



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kadir, S.Kep
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas
Bukuan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Rosnaniar
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Bukuan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

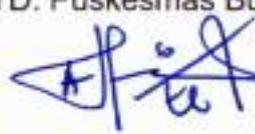
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Bukuan



drg. Rosnaniar
NIP. 197112282002122 007

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Bukuan



Abdul Kadir, S.Kep
NIP. 196703051989011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS BUKUAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

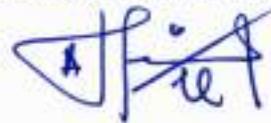
Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Bukuan)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Bukuan



Roshaniar
drg. Roshaniar
NIP. 197112282002122007

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Bukuan



Abdul Kadir, S.Kep
NIP. 196703051989011003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Harapan Baru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

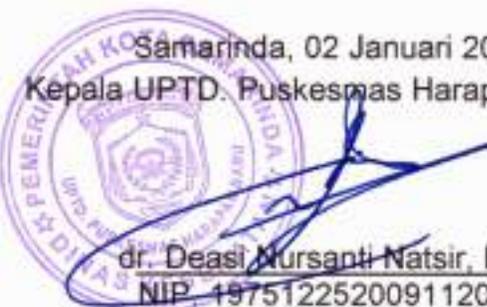
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

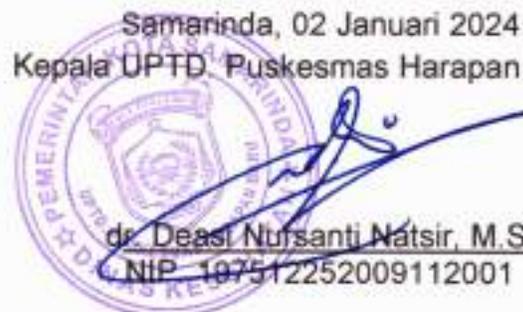
Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Harapan Baru

dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 197512252009112001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	39.435

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD. Puskesmas Harapan Baru)	Rp 500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD. Puskesmas Harapan Baru)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 600.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Harapan Baru

dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 197512252009112001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rikawati, S.ST, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Harapan Baru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Deasi Nuursati Natsir, M.Si
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Harapan Baru

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

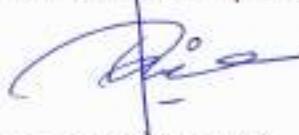
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Harapan Baru



dr. Deasi Nuursanti Natsir, M.Si
NIP. 197512252009112001

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Harapan Baru



Rikawati, S.ST, M.Si
NIP. 197107111992032007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD. Puskesmas Harapan Baru)	Rp 100,000,000
JUMLAH	Rp 100,000,000



Kepala UPTD. Puskesmas Harapan Baru

Dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 197512252009112001

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Harapan Baru

Rikawati, S.ST, M.Si
NIP. 197107111992032007



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Juanda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

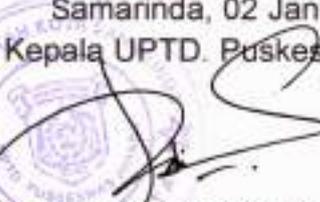
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Juanda

dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
NIP. 197403182002122005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS JUANDA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	30.240

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Juanda)	Rp 500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Juanda)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 600.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Jemid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Juanda

dr. Panuturi Rani Elizabeth Thresna Sinaga
NIP. 197403182002122005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Maryani, A.Md.Kep
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Juanda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Juanda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala UPTD. Puskesmas Juanda
dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
NIP. 19740318 200212 2 005

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Juanda


Sri Maryani, A.Md.Kep
NIP. 19780608 200112 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS JUANDA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Juanda)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000

Kepala UPTD Puskesmas Juanda



dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
NIP. 19740318 200212 2 005

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Juanda

Sri Maryani, A.Md.Kep
NIP. 19780608 200112 2 004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Ranirosanti
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Karang Asam

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 195809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Karang Asam

dr. Ranirosanti
NIP. 19690328 200003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS KARANG ASAM**

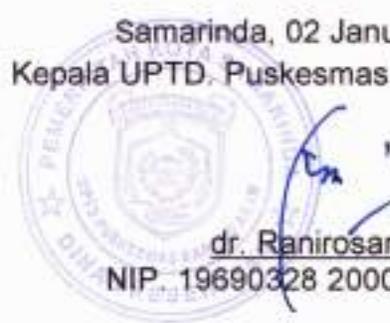
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	32.133

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Karang Asam)	Rp 750.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Karang Asam)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 850.000.000


Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Karang Asam


dr. Ranirosanti
NIP. 19690328 200003 2 004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Suhartono, S.Tr.Kep., Ns
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Karang Asam

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Ranirosanti
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Karang Asam

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Karang Asam



dr. Ranirosanti
NIP. 19690328 200003 2 004

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Karang Asam

Edi Suhartono, S.Tr.Kep., Ns
NIP. 19731012 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS KARANG ASAM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Karang Asam)	Rp 100,000,000
JUMLAH	Rp 100,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Karang Asam



dr. Ranirosanti

NIP. 19690328 200003 2 004

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Karang Asam

Edi Suhartono, S.Tr.Kep. Ns

NIP. 19731012 199303 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr.Misbahuddin Hasan
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Lempake

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Lempake

dr. Misbahuddin Hasan
NIP. 197104102010011012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS LEMPAKE**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	22.844

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Lempake)	Rp	2.300.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Lempake)	Rp	100.000.000
JUMLAH	Rp	2.400.000.000


 Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD. Puskesmas Lempake

dr. Misbahuddin Hasan
 NIP. 197104102010011012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Irma Suryani,A.Md.Kep
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Lempake

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr.Misbahuddin Hasan
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Lempake

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Lempake



dr.Misbahuddin Hasan
NIP. 197104102010011012

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Lempake

Wiwin Irma Suryani,A.Md.Kep
NIP. 196606061985112001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS LEMPAKE**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Lempake)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000



Kepala UPTD Puskesmas Lempake

dr. Misbahuddin Hasan
NIP. 197104102010011012

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Lempake

Wiwini Irma Suryani, A.Md.Kep
NIP. 196606061985112001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121
<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Zuhijrian Noor
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Lok Bahu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 198809011998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Lok Bahu
dr. Zuhijrian Noor
NIP. 198807172014031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS LOK BAHU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	35.124

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Lok Bahu)	Rp 500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Lok Bahu)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 600.000.000



 Kepala Dinas Kesehatan
 dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Lok Bahu


 dr. Luthirian Noor
 NIP. 198807172014031002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Ayu Hapsari, S.Kep, Ns
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Lok Bahu

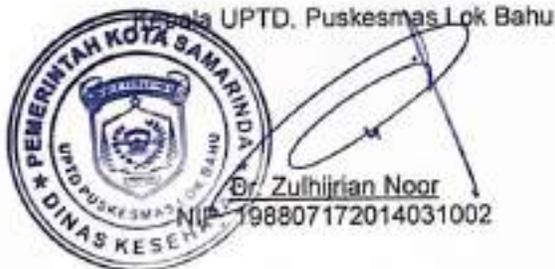
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Zulhijrian Noor
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Lok Bahu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Lok Bahu

Dina Ayu Hapsari, S.Kep, Ns
NIP. 198003072011012002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS LOK BAHU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Lok Bahu)	Rp 100,000,000
JUMLAH	Rp 100,000,000



Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Lok Bahu

Dina Ayu Hapsari, S.Kep., Ns
NIP. 198003072011012002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budy Setyawan, S.Kep
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Makroman

selanjutnya disebut pihak pertama

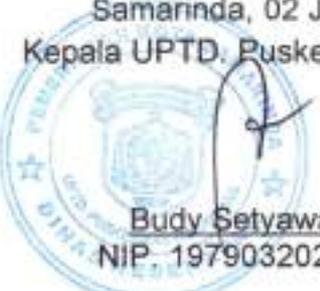
Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 198809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Makroman

Budy Setyawan, S.Kep
NIP. 197903202005021005

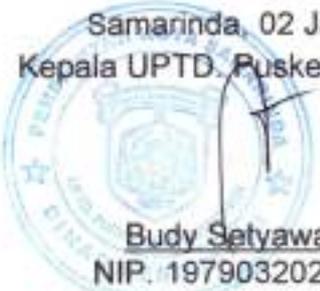
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	18.346

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Makroman)	Rp 500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Makroman)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 600.000.000

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196309111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Makroman

Budy Setyawan, S.Kep
NIP. 197903202005021005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budy Setyawan, S.Kep
Jabatan : Plh.Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Makroman

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budy Setyawan, S.Kep
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Makroman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Makroman



Budy Setyawan, S.Kep
NIP. 197903202005021005

Samarinda, 02 Januari 2024
Plh.Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Makroman

Budy Setyawan, S.Kep
NIP. 197903202005021005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS MAKROMAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Makroman)	Rp 100,000,000
JUMLAH	Rp 100,000,000



Kepala UPTD. Puskesmas Makroman

Budy Setyawan, S.Kep
NIP. 197903202005021005

Samarinda, 02 Januari 2024
Plh. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Makroman

Budy Setyawan, S.Kep
NIP. 197903202005021005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drg. Rika Ratna Puspita**
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Mangkupalas

selanjutnya disebut pihak pertama

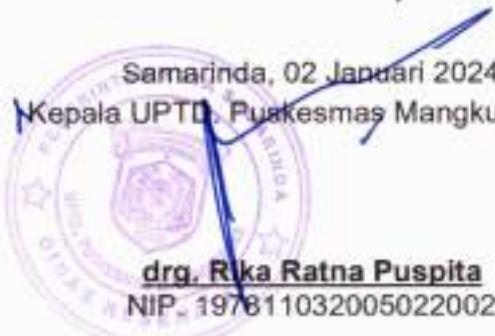
Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

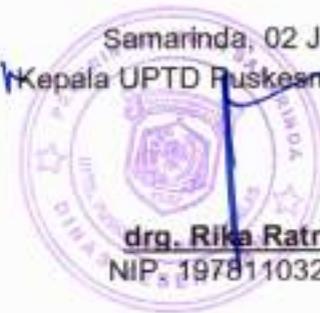
Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala UPTD. Puskesmas Mangkupalas
drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS MANGKUPALAS**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	29.620

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Mangkupalas)	Rp 170.000.000
JUMLAH	Rp 170.000.000


 Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
 NIP. 197811032005022002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Roni, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Mangkupalas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **drg. Rika Ratna Puspita**
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Mangkupalas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Puskesmas Mangkupalas

Roni, SE
NIP. 197811032005022002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS MANGKUPALAS**

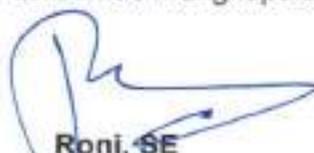
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Mangkupalas)	Rp. 170.000,000
JUMLAH	Rp 170,000,000


Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas


drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Puskesmas Mangkupalas


Roni, SE
NIP. 197811032005022002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Setyo Nugroho**
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

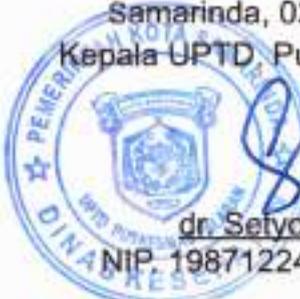
dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS PALARAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	44.254

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Puskesmas Palaran)	Rp	2.300.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Palaran)	Rp	100.000.000
JUMLAH	Rp	2.400.000.000


 Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 19680911 199803 1 009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD, Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
 NIP. 19871224 201403 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sepni Wina Fitrianty, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Palaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Setyo Nugroho
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Palaran



dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Palaran

Sepni Wina Fitrianty, S.E
NIP. 19770917 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Palaran)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000

Kepala UPTD, Puskesmas Palaran



dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD, Puskesmas Palaran



Sepni Wina Fitrianty, S.E
NIP. 19770917 201001 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarinda.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Aprillia lailati, M.M.
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Pasundan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. Ismid Kusasih
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Pasundan

drg. Aprillia lailati, M.M.
NIP. 199804121999032004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	24.831

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Pasundan)	Rp	170.000.000
JUMLAH	Rp	170.000.000


 Kepala Dinas Kesehatan
 dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Pasundan

 drg. Aprilia Lailati, M.M
 NIP. 196604121999032004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PASUNDAN

Jalan Pasundan Kel. Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75122 Telp (0541) 738937

<https://pkm-pasundan.samarindakota.go.id>

E-mail puskesmaspasundan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Yuliana, A.Md.Kep, S.Psi
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Pasundan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Aprillia Lailati, M.M.
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Pasundan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD Puskesmas Pasundan



drg. Aprillia Lailati, M.M.
NIP. 19771018 1999032004

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Pasundan

Hj. Yuliana, A.Md. Kep. S.Psi.
NIP. 19771018 199803 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS PASUNDAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Pasundan)	Rp	170,000,000
JUMLAH	Rp	170,000,000

Kepala UPTD Puskesmas Pasundan



Hj. Yuliana, M.M.
NIP. 19771018 1999032004

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Pasundan

Hj. Yuliana, A.Md. Kep. S.Psi.
NIP. 19771018 199803 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Siti Mardiah Thahir
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Remaja

selanjutnya disebut pihak pertama

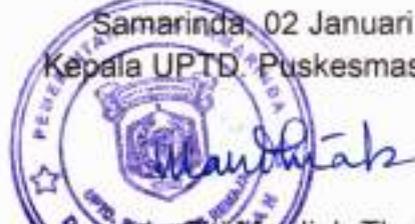
Nama : dr. H. Ismid Kusasih
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

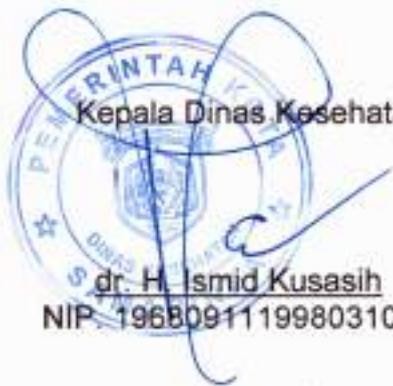

Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809114998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Remaja

dr. Siti Mardiah Thahir
NIP. 198303282010012012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS REMAJA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	37.376

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Remaja)	Rp 170.000.000
JUMLAH	Rp 170.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Sambanda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Remaja

dr. Siti Mardiah Thahir
NIP. 198308282010012012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. Noor Hariyani, S.Kep
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Remaja

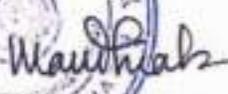
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Siti Mardiah Thahir
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Remaja

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Remaja

dr. Siti Mardiah Thahir
NIP. 198303282010012012

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Remaja



Ns. Noor Hariyani, S.Kep
NIP. 198806202014032005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS REMAJA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Remaja)	Rp 170,000,000
JUMLAH	Rp 170,000,000


Kepala UPTD Puskesmas Remaja
Mardiah
dr. Siti Mardiah Thahir
NIP. 198303282010012012

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Remaja


Ns. Noor Hariyani, S.Kep
NIP. 198806202014032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sambutan
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drg. Anita Rosanna A. Sitorus, M.Kes**
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sambutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala UPTD. Puskesmas Sambutan



drg. Anita Rosanna A. Sitorus, M.Kes
NIP. 196604281993022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SAMBUTAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	26.761

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sambutan)	Rp	170.000.000
JUMLAH	Rp	170.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Sambutan

dr. Anne Rosanna A. Sitorus, M.Kes
NIP. 196404281993022001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sambutan
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. Ria Maharani, S.Tr.Kep
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Sambutan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Anita Rosanna A. Sitorus, M.Kes
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sambutan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Sambutan



drg. Anita Rosanna A. Sitorus, M.Kes
NIP. 196604281993022001

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD, Puskesmas Sambutan

Ns. Ria Maharani, S.Tr. Kep
NIP. 197911242009032005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS SAMBUTAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sambutan)	Rp	170.000,000
JUMLAH	Rp	170,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Sambutan



drg. Anita Rosanna A. Sitorus, M.Kes
NIP. 196604281993022001

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Sambutan

Ns. Ria Maharani, S.Tr. Kep
NIP. 197911242009032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr.Wawan Aprian Noor
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Samarinda kota

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Samarinda kota

dr. Wawan Aprian Noor
NIP. 198404022011011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA**

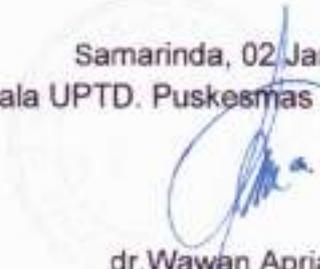
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	32.692

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Samarinda kota)	Rp	600.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Samarinda kota)	Rp	100.000.000
JUMLAH	Rp	700.000.000


Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Samarinda kota


dr. Wawan Aprian Noor
NIP. 198404022011011003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafiani Barack,S.Akun
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Samarinda kota

selanjutnya disebut pihak pertama

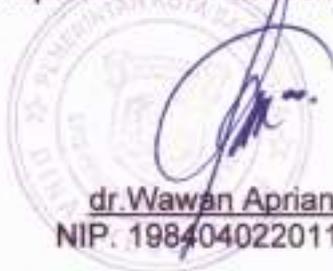
Nama : dr.Wawan Aprian Noor
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Samarinda kota

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

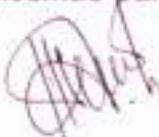
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Samarinda kota



dr. Wawan Aprian Noor
NIP. 198404022011011003

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Samarinda kota



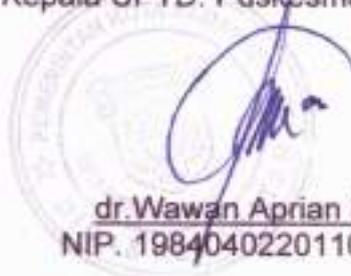
Nafiani Barack, S.Akun
NIP. 198011242010012007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

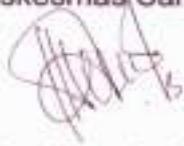
Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Samarinda kota)	Rp 100,000,000
JUMLAH	Rp 100,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Samarinda kota



dr. Wawan Aprian Noor
NIP. 198404022011011003

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Samarinda kota



Nafiani Barack, S. Akun
NIP. 198011242010012007



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Segiri
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Ira Puspa Rachmawati
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Segiri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Segiri

dr. Ira Puspa Rachmawati
NIP. 19821012 201001 2 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SEGIRI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	36.209

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Segiri)	Rp	3.000.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Segiri)	Rp	100.000.000
JUMLAH	Rp	3.100.000.000


 Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 19680911 199803 1 009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD Puskesmas Segiri

dr. Ira Puspa Rachmawati
 NIP. 19921012 201001 2 017



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Segiri
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121
<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. Siti Maidatul Janah, S.Kep
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Segiri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Ira Puspa Rachmawati
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Segiri

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Segiri

Ns. Siti Maidatul Janah, S.Kep
NIP. 19730612 199603 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS SEGIRI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Segiri)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000



 Kepala UPTD. Puskesmas Segiri
Dr. Irs. Rospa Rachmawati
 NIP. 19821012 201001 2 017

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPTD. Puskesmas Segiri



Ns. Sitti Maidatul Janah, S.Kep
 NIP. 19730612 199603 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sempaja
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Emma Ariani
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sempaja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Sempaja

dr. Emma Ariani
NIP. 19771222 200604 2 013

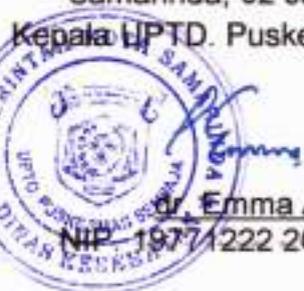
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SEMPAJA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	22.287

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sempaja)	Rp 170.000.000
JUMLAH	Rp 170.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196309111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024


Kepala UPTD. Puskesmas Sempaja
dr. Emma Ariani
NIP. 19771222 200604 2 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sempaja
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Sempaja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Emma Ariani
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sempaja

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Sempaja



dr. Emma Ariani

NIP. 19671222 200604 2 013

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Sempaja

IDA, SKM

NIP. 19660930 198703 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS SEMPAJA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sempaja)	Rp	170,000,000
JUMLAH	Rp	170,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Sempaja



Dr. Emma Ariani

NIP. 19771222 200604 2 013

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Sempaja

IDA, SKM

NIP. 19660930 198703 2 007



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sidomulyo
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg Ida Aprida
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sidomulyo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Sidomulyo

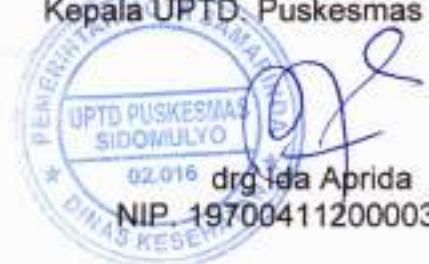
drg Ida Aprida
NIP. 197004112000032004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SIDOMULYO**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	69.954

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sidomulyo)	Rp	1.000.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sidomulyo)	Rp	100.000.000
JUMLAH	Rp	1.100.000.000


 Kepala Dinas Kesehatan
 dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD. Puskesmas Sidomulyo

 drg. Ida Aprida
 NIP. 197004112000032004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sidomulyo
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Akhmad Nuryani, SKM.M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Sidomulyo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg Ida Aprida
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sidomulyo

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Sidomulyo



drg Ida Aprida
NIP. 197004112000032004

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Sidomulyo

Eka Akhmad Nuryani, SKM.M.Si
NIP. 197412161998031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS SIDOMULYO**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sidomulyo)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Sidomulyo



drg Ida Aprida
NIP. 197004112000032004

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Sidomulyo

Eka Akhmad Nuryani, SKM.M.Si
NIP. 197412161998031003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sungai Kapih
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusiah Dewi , SST
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Kapih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 1966092119891220001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUNGAI KAPIH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	15.624

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Kapih)	Rp	170.000.000
JUMLAH	Rp	170.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismi Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Sungai Kapih

Rusliah Dewi, SST
NIP. 1966092119891220001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sungai Kapih
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashri Budi Astuti, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas
Sungai Kapih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rusiah Dewi, SST
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Kapih

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Kapih

Ashri Budi Astuti, SKM
NIP. 197907282011012003

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 1966092119891220001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS SUNGAI KAPIH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Kapih)	Rp	170,000,000
JUMLAH	Rp	170,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Kapih



Ashri Budi Astuti, SKM
NIP.197907282011012003

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Puskesmas Sungai Kapih



Rusiah Dewi, SST
NIP. 1966092119891220001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sungai Siring
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Ery Wardhana, AAK
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Siring

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Siring

dr. Ery Wardhana, AAK
NIP. 198309062010011012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUNGAI SIRING**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	17.235

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sungai Siring)	Rp 1.150.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Siring)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 1.250.000.000


 Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Siring

dr. Ery Wardhana, AAK
 NIP. 198309062010011012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sungai Siring
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. Jami'an, S.Kep.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Sungai Siring

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Ery Wardhana, AAK
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Siring

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Siring



dr. Ery Wardhana, AAK
NIP. 198309062010011012

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Sungai Siring

Ns. Jami'an, S.Kep.
NIP. 198104032005021004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS SUNGAI SIRING**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Siring)	Rp 100,000,000
JUMLAH	Rp 100,000,000

Kepala UPTD Puskesmas Sungai Siring



dr. Ery Wardhana, AAK
NIP. 198309062010011012

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Sungai Siring

Ns. Jami'an, S.Kep.
NIP. 198104032005021004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Temindung
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Andi Tenri Awaru, MARS
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Temindung

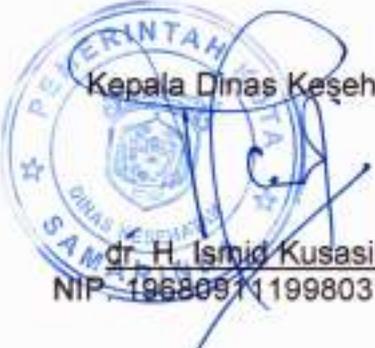
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. Ismid Kusasih
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Temindung

drg. Andi Tenri Awaru, MARS
NIP. 197201222002122001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS TEMINDUNG**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	72.531

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Temindung)	Rp 3.200.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Temindung)	Rp 170.000.000
JUMLAH	Rp 3.370.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD, Puskesmas Temindung

drg. Andi Terri Awaru, MARS
 NIP. 197201222002122001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Temindung
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI ROKHANAH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Temindung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg.ANDI TENRI AWARU,MARS
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Temindung

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Temindung


drg. Andi Tenri Awaru, MARS
NIP. 197201222002122001

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Temindung

Siti Rokhanah
NIP. 196707121992032019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS TEMINDUNG**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Temindung)	Rp 170,000,000
JUMLAH	Rp 170,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Temindung



Dr. Andri Terri Awaru, MARS
NIP. 197201222002122001

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Temindung



Siti Rokhanah
NIP. 196707121992032019



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Trauma Center
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Hj. Samriyani Sabang, M.Kes
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Trauma Center

selanjutnya disebut pihak pertama

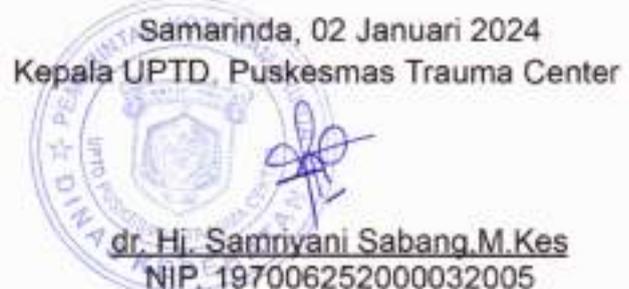
Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD, Puskesmas Trauma Center

dr. Hj. Samriyani Sabang, M.Kes
NIP. 197006252000032005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS TRAUMA CENTER**

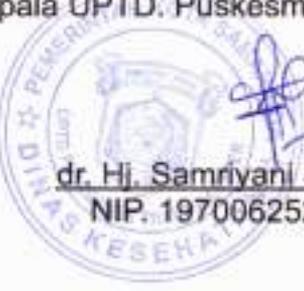
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	29.288

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Trauma Center)	Rp	4.200.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trauma Center)	Rp	100.000.000
JUMLAH	Rp	4.300.000.000


 Kepala Dinas Kesehatan

 dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD. Puskesmas Trauma Center


 dr. Hj. Samriyani Sabang, M.Kes
 NIP. 197006252000032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Trauma Center
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronald Edward Asia, S.KP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Trauma Center

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Samriyani Sabang, M.Kes
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Trauma Center

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Trauma Center



dr. Hj. Samriyani Sabang, M.Kes
NIP. 197006252000032005

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Trauma Center

Ronald Edward Asia, S.KP
NIP. 196911172003121004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS TRAUMA CENTER**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trauma Center)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Trauma Center



dr. Hj. Samriyani Sabang, M.Kes
NIP. 197006252000032005

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Trauma Center

Ronald Edward Asia, S.KP
NIP. 196911172003121004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Wonorejo
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Kartikayanti
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Wonorejo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 195809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Wonorejo

drg. Kartikayanti
NIP. 197103252003122006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. PUSKESMAS WONOREJO**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	masyarakat yang dilayani di wilayah Puskesmas	31.343

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Wonorejo)	Rp 1.400.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Wonorejo)	Rp 100.000.000
JUMLAH	Rp 1.500.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Wonorejo

drg. Kartikayanti
NIP. 197103252003122006



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Wonorejo
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Mulyani, S.Tr. Kep
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Puskesmas Wonorejo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Kartikayanti
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Wonorejo

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. Puskesmas Wonorejo

drg. Kartikayanti
NIP. 197103252003122006

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Wonorejo

Hj. Mulyani, S.Tr. Kep
NIP. 199608221987122004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. PUSKESMAS WONOREJO**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Wonorejo)	Rp	100,000,000
JUMLAH	Rp	100,000,000

Kepala UPTD. Puskesmas Wonorejo



drg. Kartikayanti
NIP. 197103252003122006

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Puskesmas Wonorejo



Hj. Mulyani, S.Tr. Kep
NIP. 199608221987122004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **apt. Palas Tumpal Doly L.Tobing, S.Farm**
Jabatan : Kepala UPTD. Instalasi Farmasi

selanjutnya disebut pihak pertama

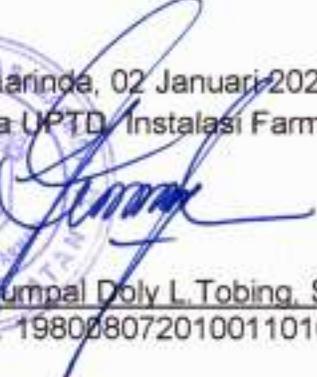
Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD Instalasi Farmasi

apt. Palas Tumpal Doly L.Tobing, S.Farm
NIP. 198008072010011010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. INSTALASI FARMASI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan	26 Paket

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan (UPTD. Instalasi Farmasi)	Rp 160.000.000
JUMLAH	Rp 160.000.000


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala UPTD. Instalasi Farmasi

apt. Palas Tumpal Doly L Tobing, S.Farm
NIP. 198008072010011010



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Asih Rahayu Pamungkas, A.Md. Far**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Instalasi Farmasi

selanjutnya disebut pihak pertama

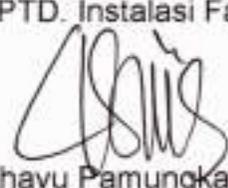
Nama : **apt. Palas Tumpal Doly L.Tobing, S.Farm**
Jabatan : Kepala UPTD. Instalasi Farmasi

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala UPTD. Instalasi Farmasi
apt. Palas Tumpal Doly L.Tobing, S.Farm
NIP. 19800807 201001 1 010

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. Instalasi Farmasi

Asih Rahayu Pamungkas, A.Md. Far
NIP. 19870321 201001 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. INSTALASI FARMASI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah Dokumen Operasional Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen Operasional Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan	4 Dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan (UPTD. Instalasi Farmasi)	Rp 160,000,000
JUMLAH	Rp 160,000,000

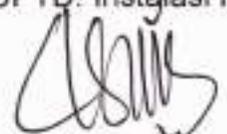


 Kepala UPTD. Instalasi Farmasi



apt. Palas Tumpal Doly L. Tobing, S.Farm
 NIP. 198008072010011010

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPTD. Instalasi Farmasi



Asih Rahayu Pamungkas, A.Md. Far
 NIP. 198703212010012009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamil, SKM.,M.Si
Jabatan : Kepala UPTD. LABKESDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kepala Dinas Kesehatan
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 198809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024

Kepala UPTD. LABKESDA
Kamil, SKM., M.Si
NIP. 197508151994031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA UPTD. LABKESDA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah masyarakat yang dilayani pada UPTD. Labkesda	Masyarakat yang dilayani pada UPTD. Labkesda	856.360

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD. LABKESDA)	Rp 3.000.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 400.000.000
JUMLAH	Rp 3.400.000.000



 Kepala Dinas Kesehatan
 Drs. H. Ismid Kusasih
 NIP. 196809111998031009

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala UPTD LABKESDA


 Kamil, SKM., M.Si
 NIP. 19760815 199403 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. Eko Prasetya Budi, SST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. LABKESDA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kamil, SKM.,M.Si
Jabatan : Kepala UPTD. LABKESDA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala UPTD. LABKESDA

Kamil, SKM., M.Si
NIP. 19780815 199403 1 002

Samarinda, 02 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD. LABKESDA

Ns. Eko Prasetya Budi, SST
NIP. 19890629 201403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD. LABKESDA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	Dokumen operasional pelayanan Puskesmas	4 dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 400,000,000
JUMLAH	Rp 400,000,000

Kepala UPTD. LABKESDA

 NIP. 19750815 199403 1 002

Samarinda, 02 Januari 2024
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPTD. LABKESDA

 Ns. Eko Prasetya Budi, SST
 NIP. 19890629 201403 1 006

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2024**

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
Terjaminnya Akses Masyarakat Pembangunan kesehatan yg berkualitas pada semua usia secara holistik dan berkelanjutan	persentase cakupan jaminan kesehatan Semesta/Universal/Health Coverage	persen	100	100.37	100.37%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0.57	0.49	86%	220,435,677,185	208,084,518,109	94.40%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
							Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	1.47	2.01	137%				Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	32	29	91%	100,470,058,614	97,968,681,969	97.51%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	0	0%	4,765,000,000	4,408,769,498	92.52%	Faktor pendukung : proses tender yang cepat Faktor Penghambat : menunggu proses pergeseran anggaran yang baru dimulai sekitar akhir bulan mei 2024 Rencana tindak lanjut : telah dilakukan proses kontrak
						Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	2	4	200%	43,038,141,614	42,619,779,850	99.03%	Faktor pendukung : Mengkoordinasikan kepada pihak terkait agar tidak terjadinya keterlambatan Faktor Penghambat : Proses persiapan Lelang memakan waktu Rencana tindak lanjut : Dokumen kontrak telah ditandatangani oleh pemenang Lelang, proses Pembangunan Fisik sedang berjalan, spj sedang berjalan
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	100%	6,600,000,000	6,391,652,626	96.84%	Faktor pendukung : sedang proses Lelang pembangunan Griya Sehat Faktor Penghambat : Proses Pembuatan DED bangunan yang cukup memakan waktu yang lama Rencana tindak lanjut : Persiapan Lelang
						Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	26	1	4%	360,000,000	342,407,000	95.11%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : -
						Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	26	4	15%	6,148,200,000	6,040,167,708	98.24%	Faktor pendukung : Mengkoordinasikan kepada pihak terkait agar tidak terjadinya keterlambatan Faktor Penghambat : Proses e-purchasing yang memakan waktu Rencana tindak lanjut : Proses pembangunan IPAL di Puskesmas sedang berlangsung, SPJ sedang berjalan

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	5	1	20%	4,960,345,000	4,871,566,000	98.21%	Faktor pendukung : Mengkoordinasikan kepada pihak terkait agar tidak terjadinya keterlambatan, melakukan proses e-purchasing, lelang setelah DPA Pergeseran disetujui Faktor Penghambat : Menunggu Proses Pergeseran DAK yang dimulai Akhir Mei 2024 Rencana tindak lanjut : Segera melakukan proses e-purchasing, Tender setelah DPA Pergeseran disetujui
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	7	0	0%	2,100,000,000	2,037,605,000	97.03%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : masih proses pergeseran anggaran Rencana tindak lanjut : proses lelang di ULP
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	69		0%	5,000,000,000	4,973,515,900	99.47%	Faktor pendukung : kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal Faktor Penghambat : kesalahan penyusunan anggaran kas sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran Rencana tindak lanjut : menunggu pergeseran anggaran kas
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3		0%	1,000,000,000	999,231,500	99.92%	Faktor pendukung : kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal Faktor Penghambat : kesalahan penyusunan anggaran kas sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran Rencana tindak lanjut : menunggu pergeseran anggaran kas
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26	0	0%	4,481,067,500	4,229,380,483	94.38%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : menunggu anggaran pergeseran Rencana tindak lanjut : sudah melakukan tahapan persiapan pengadaan
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	26	6	23%	232,700,000	232,698,900	100.00%	Faktor pendukung : sudah mendapatkan jadwal pelaksanaan kalibrasi dari LABKES Provinsi 10 Juni - 16 juli 2024 Faktor Penghambat : menunggu anggaran pergeseran Rencana tindak lanjut : melaksanakan kalibrasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	0	0%	10,500,000,000	10,371,175,083	98.77%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : proses konsultasi perencanaan yang berlangsung lama Rencana tindak lanjut : sudah dilakukan percepatan dengan pembuatan paket lelang di ULP
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	26	13	50%	10,724,604,500	9,932,236,232	92.61%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : Kekurangan SDM dan menunggu pergeseran DAK selesai Rencana tindak lanjut : dokumen persiapan pengadaan dan perencanaan sudah selesai, menunggu RKA Pergeseran
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100	0	0%	100,000,000	99,952,500	99.95%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	29	13	45%	460,000,000	418,543,689	90.99%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : Sedang Proses SPJ, Melaksanakan sesuai Jadwal
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827	856360	93%	118,142,018,571	108,603,757,213	91.93%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19702	4236	22%	4,200,093,120	3,554,498,640	84.63%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18804	4230	22%	785,846,000	709,852,092	90.33%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17911	4747	27%	1,055,709,382	603,855,090	57.20%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50557	18860	37%	537,650,000	506,104,883	94.13%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152643	99059	65%	1,508,890,000	1,330,359,500	88.17%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	860004	101619	12%	350,000,000	310,782,650	88.80%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64360	17812	28%	383,640,000	383,554,000	99.98%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	340770	56328	17%	750,000,000	743,685,400	99.16%	Faktor pendukung : kegiatan berjalan sesuai jadwal Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : -
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35291	6269	18%	1,771,153,858	1,770,703,230	99.97%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1430	804	56%	150,000,000	143,149,900	95.43%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10042	7541	75%	3,011,734,500	2,653,505,543	88.11%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasnkes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20570	13009	63%	975,900,000	857,885,750	87.91%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasnkes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	2	50%	100,000,000	99,875,150	99.88%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasnkes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4	2	50%	100,000,000	63,813,000	63.81%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : kurang terpapar dengan kegiatan bencana Rencana tindak lanjut : akan berkoordinasi dgn narasumber untuk melaksanakan kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan bulan juni

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	2	50%	11,270,834,000	10,794,740,724	95.78%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	2	50%	206,000,000	205,834,940	99.92%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	2	50%	1,419,890,000	1,412,394,299	99.47%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	2	50%	1,265,675,000	1,203,212,778	95.06%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	2	50%	150,000,000	138,607,419	92.40%	Faktor pendukung : sosialisasi ke 26 Puskesmas, pembinaan kesehatan tradisional Faktor Penghambat : kegiatan belum terlaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu narasumber dari provinsi Rencana tindak lanjut : akan melakukan kegiatan di bulan juli
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	2	50%	1,998,392,000	1,529,890,270	76.56%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyntes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1430		0%	100,000,000	99,997,650	100.00%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1430	70	5%	100,000,000	99,999,700	100.00%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4	2	50%	100,000,000	99,943,684	99.94%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyntes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	2	50%	6,415,517,998	6,099,541,100	95.07%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyntes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	2	50%	53,710,776,000	49,112,890,700	91.44%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : realisasi keuangan masih menunggu pergeseran anggaran untuk pembayaran utang tahun 2023 Rencana tindak lanjut : mengusulkan anggaran pergeseran

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	138	0	0%	50,000,000	13,986,050	27.97%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1235	1048	85%	472,450,000	472,319,000	99.97%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyankes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7	3	43%	500,000,000	486,294,538	97.26%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	0	0%	7,344,873,713	7,295,568,561	99.33%	Faktor pendukung : dipermudah dengan proses E-purchasing Faktor Penghambat : menunggu pergeseran anggaran, karena ada item yang akan digeser Rencana tindak lanjut : berproses ID paket didalam E-Purchasing
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	4,248,588,000	3,646,549,111	85.83%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Karang Asam)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,921,700	99.92%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : menunggu SP2D keluar Rencana tindak lanjut : meningkatkan koordinasi dengan bagian keuangan
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Loa Bakung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	170,000,000	170,000,000	100.00%	Faktor pendukung : koordinasi dengan bagian keuangan Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : melaksanakan kegiatan sesuai anggaran kas
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bantuas)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	97,379,800	97.38%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : menunggu SP2D keluar, masih menunggu tanda tangan PPKOM Rencana tindak lanjut : meningkatkan koordinasi dengan bagian keuangan
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kampung Baqa)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,997,500	100.00%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : menunggu SP2D terbit, terhambat karena proses e-catalog Rencana tindak lanjut : meningkatkan koordinasi dengan bagian keuangan
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Makroman)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,997,000	100.00%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : menunggu SP2D terbit, terhambat karena proses e-catalog Rencana tindak lanjut : meningkatkan koordinasi dengan bagian keuangan

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Palaran)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,999,525	100.00%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : proses e-catalog Rencana tindak lanjut : -
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Air Putih)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	100,000,000	100.00%	Faktor pendukung : Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga dan Konsultasi ke BPP Faktor Penghambat : Pembuatan SPJ Menggunakan E-cat Rencana tindak lanjut : Pembuatan SPJ masih dalam Proses dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Juanda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,957,500	99.96%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Samarinda Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,933,700	99.93%	Faktor pendukung : Koordinasi yang baik dengan pejabat pengadaan dan PPKom Faktor Penghambat : Persiapan belanja e-purchasing Rencana tindak lanjut : Terus meningkatkan komunikasi yang baik
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bengkuring)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,797,400	99.80%	Faktor pendukung : Koordinasi dengan verifikator, BPP, PPKOM dan Pejabat Pengadaan berjalan dengan baik Faktor Penghambat : Sedang proses SPJ Rencana tindak lanjut : Terus meningkatkan komunikasi yang baik
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Mangkupalas)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	170,000,000	169,829,200	99.90%	Faktor pendukung : Koordinasi dengan verifikator, BPP, PPKOM dan Pejabat Pengadaan berjalan dengan baik Faktor Penghambat : Sedang proses SPJ Rencana tindak lanjut : Sedang Proses SPJ
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Kapih)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	170,000,000	166,964,000	98.21%	Faktor pendukung : kerjasama dengan pihak ke 3 Faktor Penghambat : proses E-catalog yang lama Rencana tindak lanjut : koordinasi dengan PPKOM, dan dinkes
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Remaja)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	170,000,000	168,591,300	99.17%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : proses E-catalog pada bagian pembandingan harga Rencana tindak lanjut : koordinasi dengan PPKOM, dan dinkes
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Segiri)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	100,000,000	100.00%	Faktor pendukung : Kerjasama Pihak Ketiga yang Baik. Faktor Penghambat : SPJ masih dalam proses di BPP Rencana tindak lanjut : Koordinasi dengan BPP

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sambutan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	170,000,000	169,837,550	99.90%	Faktor pendukung : Koordinasi antara PPKom, BPP dan verifikator memudahkan proses SPJ Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sungai Siring)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	98,951,000	98.95%	Faktor pendukung : Koordinasi antara PPKom, BPP dan verifikator memudahkan proses SPJ Faktor Penghambat : Menunggu proses SP2D, dan faktor perubahan PPK / KPA Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sidomulyo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,883,475	99.88%	Faktor pendukung : laporan SPJ sudah ada di BPP Faktor Penghambat : proses verifikasi di bagian keuangan memakan waktu Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Sempaja)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	170,000,000	170,000,000	100.00%	Faktor pendukung : laporan SPJ sudah ada di BPP Faktor Penghambat : proses verifikasi di bagian keuangan memakan waktu Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Temindung)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	170,000,000	168,619,279	99.19%	Faktor pendukung : adanya koordinasi dengan BPKAD terkait pemeliharaan puskesmas Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Trauma Center)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,919,050	99.92%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lempake)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	98,908,700	98.91%	Faktor pendukung : koordinasi dengan pihak ke 3 sudah berjalan Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Lok Bahu)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,513,725	99.51%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bukuan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,837,600	99.84%	Faktor pendukung : koordinasi dengan pihak ke 3 sudah berjalan Faktor Penghambat : proses E-catalog Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Harapan Baru)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	99,546,800	99.55%	Faktor pendukung : koordinasi dengan PPKOM, BPP, dan verifikasi Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Pasundan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	170,000,000	169,757,900	99.86%	Faktor pendukung : koordinasi dengan PPKOM, BPP, dan verifikasi Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dengan Pengelola keuangan Dinkes Kota Samarinda
						Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Wonorejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	2	50%	100,000,000	97,622,000	97.62%	Faktor pendukung : Kerjasama yang baik dengan PPKOM, Pejabat Pengadaan dan pihak ke3 Faktor Penghambat : - Rencana tindak lanjut : berkoordinasi dengan pihak terkait untuk realisasi kegiatan selanjutnya
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	2	50%	419,152,000	396,403,889	94.57%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : proses E-Catalog hanya bisa membandingkan 1 penyedia. Rencana tindak lanjut : koordinasi dengan PPKOM, PPK
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39	28	72%	397,512,000	343,113,951	86.32%	Faktor pendukung : adanya peraturan PMK 34 Tahun 2022 tentang akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Sehingga faskes yang bekerjasama dengan BPJS diwajibkan terakreditasi Faktor Penghambat : belum terlaksana karena adanya perubahan rencana anggaran Rencana tindak lanjut : revisi penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, koordinasi
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	2	50%	1,549,791,000	1,266,641,500	81.73%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyankes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	2	50%	50,000,000	50,000,000	100.00%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyankes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	100%	6,200,000,000	5,734,424,432	92.49%	Faktor pendukung : telah melakukan beberapa kegiatan SPGDT seperti pelatihan BHD Faktor Penghambat : beberapa kegiatan belum dilaksanakan menunggu jadwal narasumber Rencana tindak lanjut : akan melaksanakan kegiatan pelatihan bencana dibulan juli
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10042	1103	11%	500,000,000	499,968,875	99.99%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyankes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20570	1926	9%	445,250,000	339,297,580	76.20%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyankes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang dengan Malaria yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	588	79	13%	386,700,000	385,745,930	99.75%	Faktor pendukung : kerjasama dengan fasyankes Faktor Penghambat : anggaran pergeseran DAK Rencana tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi antar seksi di Dinkes
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	32	26	81%	1,193,600,000	1,131,093,330	94.76%	Faktor pendukung : Permenkes 24 tahun 2022 yang mewajibkan fasilitas kesehatan menerapkan RME Faktor penghambat : masih ada puskesmas yang kekurangan sarana (komputer/laptop) dan kendala jaringan di beberapa puskesmas
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4	2	50%	1,193,600,000	1,131,093,330	94.76%	Faktor pendukung : Permenkes 24 tahun 2022 yang mewajibkan fasilitas kesehatan menerapkan RME Faktor penghambat : masih ada puskesmas yang kekurangan sarana (komputer/laptop) dan kendala jaringan di beberapa puskesmas

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16	3	19%	630,000,000	380,985,597	60.47%	Faktor pendukung : sudah melakukan pengawasan 3 RS yaitu, RS Tentara, RS SMC dan RS Gigi dan Mulut Unmul Faktor Penghambat : menunggu waktu pelaksanaan dan menunggu jadwal dari dinkes prov dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan Rencana tindak lanjut : Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan RS-RS baik RS pemerintah maupun RS swasta
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13	3	23%	260,000,000	169,953,298	65.37%	Faktor pendukung : sudah melakukan pengawasan 3 RS yaitu, RS Tentara, RS SMC dan RS Gigi dan Mulut Unmul Faktor Penghambat : menunggu waktu pelaksanaan dan menunggu jadwal dari dinkes prov dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan Rencana tindak lanjut : Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan RS-RS baik RS pemerintah maupun RS swasta
						Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	15	1	7%	320,000,000	173,793,049	54.31%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : kegiatan belum dilaksanakan menunggu jadwal narasumber Rencana tindak lanjut : Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan RS-RS baik RS pemerintah maupun RS swasta
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	13	11	85%	50,000,000	37,239,250	74.48%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : kegiatan belum dilaksanakan menunggu jadwal narasumber Rencana tindak lanjut : akan segera melaksanakan pertemuan dengan klinik utama pada bulan akhir Juni s.d Juli 2024
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	60	26	43%	4,790,000,000	4,758,767,279	99.35%	Faktor Penghambat : Kurangnya penyelenggara yang terakreditasi oleh kemenbeks di kota Samarinda Faktor Pendukung : SDM kesehatan dapat di latih sesuai dengan standar pelatihan
						Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan praktek yang dikeluarkan	3000	1000	33%	1,150,000,000	1,145,148,700	99.58%	Faktor Penghambat : Tidak adanya lagi verifikasi dinkes dalam perizinan Faktor Pendukung : perizinan telah dilakukan secara digitalisasi tidak manual lagi

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	2	50%	600,000,000	597,918,700	99.65%	Faktor pendukung : alur perizinan menjadi lebih simpel! Faktor Penghambat : adanya perubahan tentang alur perizinan Rencana tindak lanjut : melakukan koordinasi, sosialisasi dengan lintas sektor terkait dengan perizinan
						Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	2	50%	550,000,000	547,230,000	99.50%	Faktor pendukung : anggaran akan dialihkan kepelatihan sesuai kebutuhan SDM Faktor Penghambat : tidak dapat melakukan SPJ Honor tim sehingga Ukom Nakes tidak bisa dilaksanakan Rencana tindak lanjut : membuat rencana kegiatan apabila bisa melakukan perubahan di anggaran perubahan
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan Di wilayah Kesehatan Kota Samarinda	530	350	66%	1,740,000,000	1,719,793,500	98.84%	Faktor Penghambat : Kurangnya Sosialisasi dan Bimtek tentang Kebijakan perizinan yang baru Faktor Pendukung : Adanya peran Oragniasi Tenaga Kesehatan untuk perizinan Rencana tindak lanjut : Membuat bimtek dan sosialisasi dengan oragnisasi profesi untuk penyebaran kebijakan terbaru
						Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	2	50%	220,000,000	205,643,000	93.47%	Faktor pendukung : Fasyankes dilingkungan dinas kesehatan telah membuat rancangan kebutuhan Faktor Penghambat : tidak sesuainya perhitungan kebutuhan sehingga kekurangan SDM Rencana tindak lanjut : melakukan advokasi terhadap fasyankes dan sosialisasi menghitung rebus yang sesuai kebutuhan
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	717	300	42%	220,000,000	219,497,500	99.77%	Faktor pendukung : Menghitung kebutuhan berdasarkan standar minimal berdasarkan peraturan kemenkes no 43 dan beban kerja Faktor Penghambat : masih terdapat beberapa fasyankes yang tidak menghitung ABK berdasarkan kebutuhan Rencana tindak lanjut : Melakukan pertemuan dan konsultasi dengan tim pembina kemenkes dan berkordinasi dengan beberapa fasyankes yang masih tidak sesuai standar
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	2	50%	1,300,000,000	1,294,653,000	99.59%	Faktor pendukung : Jadwal nakesdan tk kota sudah dijadwalkan Faktor Penghambat : Menunggu pembaharuan perubahan juknis nakesdan dari kemenkes Rencana tindak lanjut : Berkordinasi dengan Dinkes Provinsi dan fasyankes untuk menyamakan persepsi dalam nakes teladan

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	250	121	48%	1,900,000,000	1,893,825,079	99.68%	Faktor Penghambat : Anggaran terbagi DAK non Fisik di masing-masing bidang Faktor Pendukung : Adanya anggaran peningkatan kompetensi SDM/Rencana tindak lanjut : Melakukan koordinasi dengan bidang penyelenggara peningkatan kompetensi SDM/Rencana tindak lanjut : Meningkatkan capaian program UKM dan UKP
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250	121	48%	1,900,000,000	1,893,825,079	99.68%	Faktor pendukung : kebutuhan Pelatihan sudah invetarisir berdasar tenaga kesehatan Faktor Penghambat : Adanya perubahan pergeseran DAK non Fisik yang tergabung dengan RKA SDMK Rencana tindak lanjut : Membuat jadwal pelatihan sesuai dengan pelataran sehat kemenkes
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya	100	50	50%	1,058,131,000	878,909,630	83.06%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
							Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	25.38	10	39%				Faktor penghambat : DAMIU dan Rumah Makan belum memiliki sertifikat operator dan pangan, kurangnya sosialisasi tentang perijinan laik sehat, belum adanya asosiasi faktor pendukung : ditunjang oleh TPP yang sudah memiliki asosiasi.
						Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	50	50	100%	263,730,000	150,527,500	57.08%	Faktor Penghambat : Kekurangan SDM dan menunggu pergeseran DAK selesai. Tindak lanjut : pembuatan SK pengawasan kegiatan, dan rapat persiapan kegiatan sudah terlaksana
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	2	50%	263,730,000	150,527,500	57.08%	Faktor pendukung : - Faktor Penghambat : Kekurangan SDM dan menunggu pergeseran DAK selesai Rencana tindak lanjut : pembuatan SK pengawasan kegiatan, dan rapat persiapan kegiatan sudah terlaksana

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	500	255	51%	420,887,000	418,067,000	99.33%	Faktor pendukung : sistem perijinan yang terintegrasi memudahkan untuk mendapatkan ijin edar
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	500	255	51%	420,887,000	418,067,000	99.33%	Faktor pendukung : sistem perijinan yang terintegrasi memudahkan untuk mendapatkan ijin edar
						Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sarana TPM (RM/Restoran, Jasaboga, Depot Air Minum(DAM) yang diawasi, mendapat Sertifikat Penjamah Makanan dan Laik Higiene dan Sanitasi	30	30	100%	50,000,000	45,400,000	90.80%	Faktor pendukung : sistem perijinan yang terintegrasi memudahkan untuk mendapatkan ijin edar
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30	30	100%	50,000,000	45,400,000	90.80%	Faktor pendukung : sistem perijinan yang terintegrasi memudahkan untuk mendapatkan ijin edar
						Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah tempat Makanan Jajanan (PKL/Pasar Ramadhan) dan Sentra Makanan Jajanan yang diawasi dan mendapat Sticker Pembinaan serta mendapat Sertifikat Penjamah Makanan	100	100	100%	50,000,000	45,000,000	90.00%	Faktor penghambat : Kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan di tingkat kota, sosialisasi penggunaan stiker masih kurang, proses penerbitan stiker yang bertahap dan berjenjang. Tindak lanjut : Akan membentuk tim penyuluh keamanan pangan tingkat Puskesmas

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	10	10%	50,000,000	45,000,000	90.00%	Faktor penghambat : Kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan di tingkat kota, sosialisasi penggunaan stiker masih kurang, proses penerbitan stiker yang bertahap dan berjenjang. Tindak lanjut : Akan membentuk tim penyuluh keamanan pangan tingkat Puskesmas
						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	200	200	100%	273,514,000	219,915,130	80.40%	Faktor penghambat : Anggaran yang digunakan bersumber dari DAK BPOM, anggaran ini masih dalam proses. Tindak lanjut : akan mengusulkan penambahan anggaran untuk sampling pemeriksaan yang bersumber dari APBD
						Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	200	200	100%	273,514,000	219,915,130	80.40%	Faktor penghambat : Anggaran yang digunakan bersumber dari DAK BPOM, anggaran ini masih dalam proses. Tindak lanjut : akan mengusulkan penambahan anggaran untuk sampling pemeriksaan yang bersumber dari APBD
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase menurunnya angka kesakitan penyakit tidak menular	10.5	10.5	100%	1,454,588,826	1,400,363,217	96.27%	Faktor pendukung : meningkatkan screening kesehatan Faktor penghambat : tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan rendah
						Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	1	0	0%	100,000,000	99,913,000	99.91%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100%	100,000,000	99,913,000	99.91%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	21	3	14%	365,000,000	314,304,800	86.11%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	21	3	14%	215,000,000	164,444,800	76.49%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100	20	20%	150,000,000	149,860,000	99.91%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	3	1	33%	989,588,826	986,145,417	99.65%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3	1	33%	989,588,826	986,145,417	99.65%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	persen	84	96.36	114.71%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	82.3	82.45	100%	296,331,158,190	261,214,882,385	88.15%	faktor penghambat : tidak semua bidang menerapkan barcode SKM untuk pelayanan tindak lanjut : memberikan arahan untuk semua bidang menggunakan barcode untuk pelayanan
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	70.5	74.25	105%	200,000,000	188,143,821	94.07%	faktor penghambat : koordinasi dengan bidang-bidang terhambat karena banyaknya kegiatan di bidang faktor pendukung : SDM yang sudah dilatih dan bimtek dalam evaluasi kinerja
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	3	43%	100,000,000	90,058,000	90.06%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1	33%	50,000,000	48,085,821	96.17%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	50%	50,000,000	50,000,000	100.00%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	3	43%	171,397,531,184	148,040,398,296	86.37%	Faktor penghambat : menunggu dari SIPD RI karena aplikasi baru sehingga banyak laporan yang di upgrade Tindak lanjut : akan membuat laporan manual
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1057	1057	100%	154,277,949,038	133,081,781,883	86.26%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	888	888	100%	17,069,582,146	14,911,019,863	87.35%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	100%	50,000,000	47,596,550	95.19%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	1945	1945	100%	64,714,900	16,850,000	26.04%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10	10	100%	16,974,400	16,850,000	99.27%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	0	0%	15,913,500	-	0.00%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	0	0%	15,913,500	-	0.00%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	0	0%	15,913,500	-	0.00%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	4	50%	621,947,950	442,951,041	71.22%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1	50%	5,998,000	5,942,600	99.08%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1	50%	100,000,000	99,500,000	99.50%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	10	50%	108,500,000	101,054,000	93.14%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	15	50%	50,000,000	44,840,000	89.68%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50	25	50%	50,799,950	50,670,100	99.74%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	1	50%	16,050,000	4,023,125	25.07%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000	250	25%	92,000,000	61,190,825	66.51%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	6	16%	198,600,000	75,730,391	38.13%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	2	50%	6,542,770,759	6,188,066,882	94.58%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa	12	5	42%	5,333,260,759	5,136,897,907	96.32%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	1	50%	119,910,000	92,760,000	77.36%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	2	50%	1,089,600,000	958,408,975	87.96%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	2	50%	906,761,750	811,671,512	89.51%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	345	39	11%	170,975,000	142,125,000	83.13%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345	39	11%	149,848,750	118,804,912	79.28%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	75	50%	194,378,000	162,391,200	83.54%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	30	3	10%	391,560,000	388,350,400	99.18%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	12	6	50%	116,597,431,647	105,526,800,833	90.51%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Labkesda)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	4,345,864,472	3,759,416,664	86.51%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Temindung)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	3,138,888,251	2,468,989,441	78.66%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bantuas)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	636,932,672	562,774,612	88.36%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Trauma Center)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	4,464,576,511	3,143,465,072	70.41%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Kampung Baqa)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	2,404,438,647	1,874,521,229	77.96%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD IA. MOEIS)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	79,131,905,150	77,803,518,342	98.32%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Segiri)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	2,418,345,850	2,239,369,433	92.60%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Palaran)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	3,170,773,004	3,165,846,309	99.84%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sungai Siring)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	1,141,657,400	472,639,988	41.40%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Air Putih)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	1,583,223,500	590,684,920	37.31%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Samarinda Kota)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	1,149,579,877	457,740,021	39.82%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Wonorejo)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	1,874,803,379	1,465,272,341	78.16%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Lempake)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	2,601,922,636	2,473,817,598	95.08%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Sidomulyo)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	1,505,995,530	23,116,400	1.53%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Lok Bahu)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	889,756,086	640,716,563	72.01%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bukuan)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	1,161,970,968	136,979,418	11.79%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Makroman)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	855,304,507	640,349,784	74.87%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :

SASARAN DINAS KESEHATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	% Capaian Anggaran	ANALISA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (FAKTOR PENDUKUNG / FAKTOR PENGHAMBAT)
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Juanda)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	731,567,776	257,293,744	35.17%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Harapan Baru)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	752,320,951	764,942,768	101.68%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Karang Asam)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	1,039,528,639	1,032,696,268	99.34%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Puskesmas Bengkuring)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	100%	1,598,075,841	1,552,649,918	97.16%	Faktor pendukung : Faktor Penghambat : Rencana tindak lanjut :
						TOTAL					524,069,555,201	476,337,440,620	90.89%	